



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

ALIMIN RIBUT SUJONO, SH

B4A 008 004

Pembimbing :

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2009

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL

Disusun Oleh :

ALIMIN RIBUT SUJONO, SH

NIM. B4A 008 004

**Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal.....**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing,

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL

Disusun Oleh

ALIMIN RIBUT SUJONO, SH

NIM. B4A 008 004

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH

NIP. 194907211976031001

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH

NIP. 194907211976031001

KATA PENGANTAR

Pujisyukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus atas kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan diri untuk menulis dan menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin. Namun penulis mengerti betul bahwasannya hasil penelitian ini masih perlu untuk disempurnakan lagi, mohon pembaca member kritik dan saran yang membangun.

Selama proses penulis tesis ini, penulis telah menerima bantuan baik sumbangan pemikiran, fasilitas maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis untuk itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk itu dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS, Med, Sp And selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing
3. Ibu Ani Purwati, selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum yang telah membantu kesempurnaan tesis ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak dan Ibuku yang selalu mendoakan anaknya.
6. Istriku Christina Sri Hanawati, S.Pd yang selalu mendoakan suami tercintanya
7. Anakku Rhema Nafiri Syalom dan Hizkia Ebenhaizer
8. Bapak Farid Fauzi, SH selaku Ketua Pengadilan PN Pati
9. Rekan-rekan Hakim di PN Pati

10. Vitri Pujiriyanto yang telah membantu dalam memberikan masukan dan semangat sehingga terselesaikannya tesis ini.
11. Rekan-rekan kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Semarang, Desember 2009

Penulis

ABSTRAK

Begitu pentingnya masalah anak sehingga seluruh bangsa di seluruh dunia, mempunyai perhatian yang besar terhadap anak. Persoalan perlindungan anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat penting karena bagaimanapun anak pelaku tindak pidana merupakan generasi penerus dan masa depan suatu bangsa. Berkaitan dengan sistem peradilan pidana, Indonesia telah mempunyai undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dimana undang-undang ini telah didesign sebagai sarana menangani perkara anak nakal di Pengadilan. Artinya mau tidak mau titik sentral anak nakal terletak pada hakim.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal?
2. Problematika yuridis maupun praktis apa saja yang ada dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal?
3. Bagaimanakah tindakan hakim dalam mengatasi problematika yuridis maupun praktis penjatuhan sanksi terhadap anak nakal?

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Dalam pelaksanaannya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim hakim dalam rangka penjatuhan sanksi yakni meliputi factor yuridis dan factor non yuridis. Sedangkan probelmatika yuridis dan praktis berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang bersinggungan dengan hukum acara pidana anak dan hukum acara pada umumnya. Sedangkan tindakan hakim di masa yang akan datang memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dengan berperspektif perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Kata Kunci : Pengadilan Anak, Kenakalan Anak

ABSTRACT

Juvenile delinquency problems is very important in the world. It have an attention in the children. Problems about juvenile delinquency is one things because juvenile delinquent is the next generation. To catch in the criminal justice system, Indonesia having the rule about juvenile delinquent, the rule is The Rule Number 3 Year 1997 about Juvenile Delinquency. The rule was designed to result juvenile delinquency in the court. It's mean the focus of juvenile delinquency in the judge.

Beside the problems can be solve the problems consist of:

1. How the factor to define of judge to falling the sanction about juvenile delinquen?
2. How juridical dan practical about falling the sanction in juvenile criminal justice ?
3. How the judge doing to get juridical dan practical to falling the the sanction about juvenile delinquency?

To resosolve the research, the composer use to resech method juridical empiric. It is hope to answer the problems.

Doing the factors of judge define the falling of sanction include juridical factor and non juridical factor. Beside to resolve to juridical dan practical factor, the procedural problems with falling the sanction the procedural system. In the future, doing the judge have a goal to perspective about save the children and welfare the child.

Key word: Juvenile justice, juvenile delinquency

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	28
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 31
A. Pengertian Anak Nakal	31
B. Kenakalan Anak	33
C. Pidana dan Tujuan Pemidanaan	37
1. Pidana.....	37
2. Tujuan pemidanaan	39
D. Batas Usia Pemidanaan Anak	50
E. Jenis-jenis Sanksi Terhadap Anak Nakal	52
F. Persidangan Anak dan Pemberian Sanksi Terhadap Anak	55
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 63
A. Faktor-faktor penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal	63
A.1 Deskripsi Kasus Penjatuhan Sanksi Pada Anak	63

A.2 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Anak	71
B. Problematika Yuridis maupun Praktis Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak nakal.....	78
C. Tindakan Hakim Dalam Mengatasi Problem Yuridis dan Praktis Penjatuhan Sanksi Pada Anak Dimasa Yang Akan Datang.....	102
BAB IV PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	129

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itulah anak memperoleh perhatian yang luar biasa tidak saja oleh negara akan tetapi masyarakat dunia. Begitu pentingnya anak maka semua negara-negara di dunia berfikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk anak.

Sejarah perhatian masyarakat dunia terhadap anak dapat ditelusuri mulai dari perhatian yang mendalam serta berkat usaha seorang yang bernama Eglantine Jebb yang telah membuat rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) sebanyak 10 (sepuluh) butir yang selanjutnya pada tahun 1924 Deklarasi Hak Anak tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan Deklarasi Jenewa, dan setelah mengalami perjuangan panjang sampai akhirnya melalui Perserikatan Bangsa-bangsa disepakati adanya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*)

yang merupakan ketentuan yang berlaku sebagai hukum internasional.¹

¹ Berakhirnya Perang Dunia 1, mengakibatkan penderitaan yang dialami oleh kaum perempuan dan anak – anak, pawai protes bermunculan menuntut perhatian dunia atas nasib anak – anak

Perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sendiri dapat ditelusuri mulai dari apa yang telah diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat) yang antara lain menyebutkan,” ... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesian dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu,..” dari rumusan tersebut diketahui perhatian terhadap anak juga merupakan bagian dari tujuan negara.

Implementasi dari tujuan negara berkaitan dengan perlindungan anak di bidang hukum dapat diketahui dari telah dibuatnya berbagai peraturan perundangan yang telah pula mengadopsi ketentuan internasional antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maupun Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berbagai

pada tahun 1923 , **Eglantyne Jebb** membuat rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration of the Rights of Child*) berisi 10 pernyataan hak anak yang kemudian tahun 1924 Deklarai hak Anak diadopsi Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan,” Deklarasi Jenewa” sebagai rancangan deklarasi hak anak , setelah berakhirnya perang dunia II , tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), dalam deklarasi itu beberapa hak khusus bagi anak tercakup di dalamnya. Pada tahun 1959,PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak, yang merupakan Deklarasi Internasional ke dua. Selanjutnya bersamaan ditetapkannya tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional, suatu kelompok kerja dibentuk untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak. 20 Nopember 1989 rancangan Konvensi Hak Anak selesai dan langsung diadopsi oleh PBB. Pada 2 September 1990 Konvensi Hak Anak (*Concentration on tehe Rights of the Child*) mulai berlaku sebagai Hukum Internasional.

ketentuan yang telah diundangkan di Indonesia tersebut merupakan bukti betapa besar perhatian negara Indonesia terhadap anak tanpa terkecuali terhadap anak nakal.

Memahami perilaku anak tidaklah semudah membalikkan tangan, kesalahan –kesalahan penanganan terhadap anak nakal sering dilakukan karena tindakan anak nakal dipandang atau setidaknya tidaknya disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak nakal sebagai pelaku tindak pidana mempunyai karakteristik sendiri, untuk itu penanganannya haruslah dilakukan secara hati-hati. Sebagai anak pikiran dan kehendaknya belumlah sempurna sehingga belum dapat menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan oleh karena itu pilihan perbuatan yang dilakukan dalam banyak hal telah dipengaruhi lingkungan sekitarnya sehingga dominasi lingkungan telah membuat anak berperilaku tidak sebagaimana yang diharapkan.

Keluarga dan selanjutnya lingkungan masyarakat merupakan tempat bertumbuhnya anak baik dari segi jasmani maupun rohani seharusnya merupakan pihak pertama yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak. Untuk itu segala bentuk ketidakmampuan mendidik anak yang mengakibatkan terjadi penyimpangan perilaku anak, terhadap anak tersebut haruslah dipandang

sebagai korban,hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hadi Supeno.²

" Mereka korban dari lingkungan yang keras, tayangan media massa yang banyak mengumbar kekerasan, para orang tua yang tak peduli, lingkungan sosial yang asing, pendidikan yang tidak ramah kepada anak karena para guru lebih berkonsentrasi bagaimana mencapai target politik seperti ujian nasional dan sertifikasi guru,"

Bertitik tolak dari pemahaman di atas maka kebijakan yang digunakan dalam menangani anak nakal haruslah sedemikian rupa sehingga tidak merusak bahkan menghancurkan masa depan anak.

Filosofi dasar perlakuan terhadap anak nakal adalah untuk kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*),namun kenyataannya perilaku masyarakat akhir-akhir ini sangat memprihatinkan , betapa masyarakat begitu mudahnya menghakimi orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tanpa memandang bulu. Tidak peduli apakah pelaku yang diduga tersebut sudah dewasa atau masih anak-anak. Sebagai contoh dapat dikemukakan,” Seorang bocah usia 13 tahun menjadi bulan - bulanan warga dan nyaris dihakimi massa setelah kepergok mencuri hand phone dan dompet didalam sebuah Gereja. “.³

Fenomena lain yang ada dalam masyarakat adalah selain begitu mudahnya memberikan penghakiman sendiri, yang tentunya sangat

² <http://www.antara.co.id/arc/2008/6/17/anak-geng-nero-butuh-pemulihan-mental/>

³ http://news.indosiar.com/news_read.htm.id

bertolak belakang dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan penyelesaian-penyelesaian alternatif (baik melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa ataupun adat) dalam penyelesaian perkara. Masyarakat juga begitu mudahnya menggunakan lembaga pidana sebagai pilihan pertama dalam menangani perkara. Benar pilihan ini sejalan dan sesuai dengan hukum akan tetapi hal ini tentunya bertolak belakang dengan ide pemidanaan sebagai ultimum remidium, sebagai upaya terakhir apabila segala upaya yang ditempuh sudah dipandang tidak mampu lagi menyelesaikan. Seharusnya penyelesaian-penyelesaian alternatif yang dalam istilah Barda Nawawi disebut Mediasi Penal yang, “ merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”,⁴ lebih didahulukan daripada penggunaan lembaga pidana. Celaknya terhadap anak nakal tanpa terkecuali juga diperlakukan demikian.

Perubahan dari mendahulukan penyelesaian alternatif dalam masyarakat dengan menggunakan sarana pidana yang semakin meningkat menarik untuk dicermati, apakah fenomena ini merupakan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam berhukum atau justru sebaliknya, hukum hanya digunakan sebagai sarana /alat kepentingan atau bahkan hanya untuk memuaskan nafsu belaka.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, "Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan"*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal.2.

Konsekwensi dari apa yang diuraikan di atas banyak perkara termasuk perkara anak nakal di pengadilan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan sehingga terkesan setiap perbuatan anak nakal dapat dipastikan selalu diproses melalui jalur hukum. Hal ini tentulah sangat bertolak belakang dengan filosofi penanganan anak nakal yang mengutamakan kepentingan anak diatas segalanya.

Satjipto Rahardjo menyatakan,” Tidaklah salah apabila orang berharap banyak terhadap hukum, karena negara ini memanglah negara hukum. Tetapi celakanya,hukum kita belum banyak memenuhi harapan tersebut.⁵ Untuk itu sepatutnyalah para penegak hukum memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati dalam menangani setiap perkara khususnya terhadap perkara anak nakal jangan sampai penanganan perkara merupakan pemenuhan target belaka atau bahkan hanya untuk memuaskan para pihak semata.

Harus diakui perbuatan-perbuatan yang dilakukan anak nakal dalam banyak hal bukan lagi dapat dikategorikan sebagai kenakalan semata akan tetapi sudah bersinggungan dengan tindakan kriminal. Masih segar dalam ingatan peristiwa yang menggemparkan dan terkenal dengan sebutan “ *Geng Nero* “yang merupakan sekumpulan anak-anak perempuan berstatus pelajar dan telah melakukan kekerasan terhadap sesama pelajar perempuan di luar kelompoknya atau perkara anak yang

⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal.55.

bernama Raju di Sumatera Utara maupun perkara ditahannya 7 (tujuh) anak Sekolah Dasar karena melakukan perjudian di Bandara Sukarno-Hatta dan selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri Tangerang.

Fenomena anak berkonflik dengan hukum ternyata tidak terjadi di pulau Jawa akan tetapi juga sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia. Kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai geng ternyata tidak lagi menjadi monopoli laki-laki akan tetapi juga sudah menjadi bagian dari anak perempuan. Kekerasan-kekeraan yang ditampilkan sudah sedemikian rupa sehingga bentuk kekerasan tersebut sudah tidak dapat ditolerir.

Bentuk-bentuk kenakalan yang semakin bervariasi tentulah sangat memprihatinkan, oleh karena itu jika kebijakan penal harus terpaksa digunakan, maka kebijakan penal yang digunakan dalam menangani anak nakal tentulah harus dilakukan ekstra hati-hati mengingat kebijakan penal tersebut justru dapat kontra produktif dari tujuan yang hendak dicapai apabila diberlakukan terhadap anak.

Jika demikian kalaulah pembedaan harus dijatuhkan, perlu disadari penjatuhan pidana adalah merupakan proses rangkaian tindakan represif dari system penegakan hukum pidana, dan dalam kasus anak nakal filosofi penjatuhan pidananya sangat berbeda dengan orang dewasa, sehingga justru karena itu sangatlah wajar anak nakal mendapatkan perlakuan khusus dalam Undang-Undang nomer 3 tahun 1997.

Indonesia sebagai salah satu negara modern telah menggunakan konsepsi baru fungsi pemidanaan yaitu sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dikenal dengan ,” Pemasyarakatan “”Namun bagi anak nakal diperlukan lebih dari reintegrasi dan rehabilitasi sosial.

Karena Sistem Peradilan Pidana yang ditegakkan adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan anak dan dalam rangka mengutamakan kepentingan anak, ini berarti seluruh pendekatan yang digunakan untuk menangani anak haruslah berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Di satu sisi lahirnya Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak sungguh menggembirakan akan tetapi ternyata dalam praktek justru menimbulkan problem yang bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Dapat dikemukakan penyebutan anak nakal dalam semua tingkat pemeriksaan mau tidak mau telah mengakibatkan stigmatisasi anak, meskipun anak tersebut belum tentu bersalah. Penyebutan anak nakal ini menunjukkan ada kelemahan substansial dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Salah satu pertimbangan utama diundangkannya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain adalah kehendak Pemerintah untuk mewujudkan suatu penanganan perkara anak yang terlibat tindak pidana secara lebih baik daripada terdahulu dan penanganannya

memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Pertimbangan di atas menunjukkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memang sejak awal sudah didisain diperuntukkan untuk menangani anak dalam proses peradilan, dengan kata lain kebijakan kriminal yang dianut dalam menangani anak nakal lebih diutamakan melalui proses persidangan, sehingga sangatlah logis meskipun proses ini menimbulkan stigmatisasi pada anak, diversi-diversi tidaklah merupakan pilihan dalam UU No. 3 tahun 1997. Bahkan menurut Paulus Hadisuprpto,”... substantif UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengisyaratkan bahwa UU tersebut tidak mengatur tentang diversi.”⁶

Jika demikian tanpa mengecilkan arti dari lembaga lain (kepolisian,jaksa,BAPAS, maupun LP Anak), maka mau tidak mau titik sentral penanganan anak nakal bertitik tumpu di tangan hakim anak, hakim anaklah sesuai Undang-Undang No.3 tahun 1977 yang mempunyai peran besar mengemban amanat penanganan anak nakal berdasarkan kepentingan terbaik anak (*the best interes of the child*). Undang-Undang memberikan peran aktif dan dominan kepada hakim (anak) dalam proses

⁶ Paulus Hadisuprpto,” *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang* “ Kumpulan Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Badan Penerbit Univesitas Diponegoro, Semarang, 2006,hal.10

pidana, dibandingkan dengan peran penyidik, penuntut umum demikian Paulus Hadisuparpto.⁷

Peran hakim yang besar dalam menangani perkara anak berkonsekuensi, hakim anak tersebut benar-benar harus memahami kepentingan terbaik anak yang terutama (*the best interest of the child*). Putusan yang diambil haruslah dapat memberikan keadilan sehingga berguna dan bermanfaat bagi anak.

Setiap putusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan benar, sanksi apa yang seharusnya dijatuhkan kepada anak nakal, mengapa sanksi tersebut dipilih dan apa tujuannya serta berbagai pertimbangan yang pada pokoknya demi kepentingan anak itu sendiri.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat di sini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.
2. Problematika yuridis maupun praktis apa saja yang ada dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.
3. Bagaimanakah tindakan hakim dalam mengatasi problematika yuridis maupun praktis penjatuhan sanksi pada anak di masa yang akan datang.

⁷ Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit*, hal 15.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian di sini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka menjatuhkan sanksi terhadap anak nakal.
2. Untuk mengetahui problematika yuridis maupun praktis yang ada dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.
3. Untuk mengetahui tindakan terbaik yang dilakukan hakim dalam mengatasi problematika yuridis maupun praktis dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dimasa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana anak baik materiil maupun formil dan pada umumnya dalam pengembangan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam praktek ,khususnya menjadi bahan pertimbangan para hakim dalam memutus perkara anak nakal.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis.

1.1 Pengertian Anak.

Untuk memahami pengertian tentang anak perlu dikemukakan beberapa definisi berikut ini:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan anak adalah manusia yang masih kecil sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk yang berakal budi.⁸

Menurut Kartini-Kartono,” Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya’.⁹

Dari kedua pengertian tersebut diatas dapat dikatakan anak adalah makhluk berakal budi yang masih akan berkembang menjadi manusia yang utuh. Dalam rangka menuju manusia yang utuh tersebut karena masih muda usia dan jiwanya maka sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

Dalam rangka perkembangan menuju kedewasaan anak akan melalui periode-periode kritis , dan jika periode-periode kritis ini tidak dapat dilalui dengan harmonis maka akan timbul gejala-gejala yang menunjukkan,... kepribadian yang terganggu bahkan menjadi

⁸ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>

⁹ Kartini-Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.hal.187.

gagal sama sekali dalam tugas sebagai makhluk sosial untuk mengadakan hubungan antar manusia yang memuaskan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang dilingkungannya.¹⁰

Perkembangan anak merupakan perkembangan yang bersifat menyeluruh, menurut B. Simandjuntak, perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan fisik, emosional sosial dan intelektual. Bila kesemuanya ini berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya.¹¹ Untuk itu memahami anak berarti pula memahami perkembangan anak itu sendiri dan mengatasi problematik anak sangatlah wajar apabila segala bentuk yang dilakukan semata-mata dengan tujuan demi kepentingan anak itu sendiri.

1.2 Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia.

Anak dalam kajian hukum positif di Indonesia lazim disebut sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau dalam keadaan di bawah umur, belum *kuat gawe*. (jw-adat) atau orang yang belum cakap bertindak sehingga kerap kali disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

¹⁰ B. Simandjuntak . *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung. 1979. hal 225.

¹¹ *Loc.Cit.*

Dari perundang-undangan yang ada dapat ditelusuri adanya batasan umur terhadap anak meskipun batasan ini di sana sini berbeda-beda yang menunjukkan tidak ada unifikasi batasan umur terhadap anak di Indonesia. Batasan-batasan umur anak dalam beberapa ketentuan Undang-Undang dapat dikemukakan sebagai berikut;

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* Stb 1847 nomer 23).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebut anak, akan tetapi dengan penyebutan yang dimaksudkan dengan belum dewasa, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 330 BW/KUHPerdata menentukan ,” Belum dewasa adalah ,mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.¹²

b. Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Batasan anak dalam Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 dapat diketahui dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) dimana dapat dikatakan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

¹² R .Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita.Jakarta.cetakan ke tiga puluh Sembilan. Hal.90.

c. Undang-Undang Nomer 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka (2) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan,” Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.¹³

d. Undang-Undang Nomer 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 8 huruf a, b dan c UU No. 12 tahun 1995, berkaitan dengan pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan “ Anak Didik Pemasyarakatan”. Anak didik ini ada 3 (tiga) jenis yaitu : Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.

Batas umur menjadi Anak Didik Pemasyarakatan adalah sampai 18 (delapan belas), sehingga dapatlah disimpulkan jika UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan batas umur anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

**e. Undang-Undang Nomer 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak.**

Batasan umur seseorang disebut anak ditentukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomer 3 tahun 1997 dimana Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

**f. Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan ,anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Undang-Undang ini menentukan batas usia anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan yang menarik berbeda dengan ketentuan perUndang-Undangan yang lain anak yang masih dalam kandunganpun sudah mendapat perlindungan hukum.

¹⁴ Undanag-Undang Republik Indonesia Nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

h. Undang-Undang Nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 butir (26) menyebutkan,” Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.¹⁵

Terlepas dari perbedaan penentuan batas umur, penentuan berdasarkan umur adalah merupakan ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan ,hal ini sesuai dengan pendapat Paulus Hadi Suprpto yang menyatakan, Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku delinquen anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.¹⁶

1.3. Putusan Hakim dan Pidanaan Anak Nakal.

Peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit karena adanya tuntutan hak,yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “*eigenrichting*”, demikian Soedikno Mertokusumo dalam Seminar Nasional dengan thema “Menyongsong Lahirnya Undang-Undang

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, Op.Cit. hal. 7.

Peradilan Anak dalam Upaya Mengayomi dan Melindungi Anak Indonesia”.¹⁷

Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah hukum mencapai puncaknya.¹⁸ Lebih lanjut Soedikno Mertokusumo mengatakan tujuan peradilan bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula ,maka dalam peradilan anak janganlah hendaknya dititikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa

¹⁷ Soedikno Mertokusumo, *Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Peradilan Anak dalam Upaya mengayomi dan Melindungi Anak Indonesia*, dalam Romli Atmasasmita dan Team Penyunting , *Peradilan Anak Di Indonesia* , Mandar Maju, Bandung,1997, hal 49.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2006,hal.182-183.

kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi hari depan si anak.¹⁹

Hakim dalam menangani perkara anak nakal haruslah selalu sadar bahwa anak bukanlah orang dewasa yang masih kecil sehingga perlu pendekatan yang khusus dalam penanganannya. Dalam hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberi peringatan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani perkara anak.²⁰

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) jangan dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Demikian pula The Beijing Rule yang merupakan Resolusi MU-PBB 40/33 th. 1985, menentukan perampasan kemerdekaan anak harus dipertimbangkan masak-masak dan dilandaskan pada asas-asas dan prosedur yang tertuang dalam resolusi ini,...Perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin

¹⁹ Soedikno Mertokusumo *Loc.Cit.* hal.49.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni,2007), hal. 123-124.

sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal.dan untuk kasus-kasus tertentu saja.²¹

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim harusah sesuai dengan tujuan pemidanaan ,pemidanaan tanpa tujuan akan membabi buta,kehilangan arah dan akan mencabik-cabik pemidanaan itu sendiri. Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari system pemidanaan.²²

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tujuan pidana/pemidanaan apabila bertolak dari tujuan nasional harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu :²³

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.

²¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung 1997.hal. 116.

²² Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang,2009,hal 8.

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*hal 45-46

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, pidana/hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, oleh karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari keempat aspek tujuan perlindungan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Barda

Nawawi Arief tujuan pembedaan pada intinya mengandung dua aspek pokok, yaitu ;²⁴

1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana.

Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan :

- a. Pencegahan Kejahatan.
- b. Pengayoman (pengamanan) masyarakat.
- c. Pemulihan keseimbangan masyarakat :
- d. Penyelesaian konflik (*conflict oplosing*)
- e. Mendatangkan rasa damai (*vrede making*).

2) Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana).

Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan :

- a. Rehabilitasi, reduksi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana, antara lain :
 - Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak/merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat.
 - Agar berbudi perkerti (berakhlak Pancasila).
- b. Membebaskan rasa bersalah.
- c. Melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hal 49.

F. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang dapat menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Menurut Soerjono Soekanto,” Penelitian adalah kegiatan yang hati-hati tekun dan mencakup penyelidikan terhadap masalah ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan manusia”.²⁵

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan :

“ Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan “.²⁶

1. Metode Pendekatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris , yakni cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian

²⁵ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, IND-HILL-Co, Jakarta, 1990, hal.5.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal.84.

dilanjutkan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian.

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti sekaligus melakukan analisis.²⁸

Penelitian ini dikatakan deskriptif analitis karena dari hasil penelitian dapat diharapkan akan memberikan gambaran dan kajian terhadap alasan-alasan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal berikut pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara anak nakal maupun segala problem yuridis yang melingkupinya, dan dikatakan analitis karena setiap data yang diperoleh akan dianalisis dari aspek yuridis.

3. Objek dan Subjek Penelitian.

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian (objek) mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan subjek penelitian dimaknai

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hal.1.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.52.

sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.²⁹

Subjek dan Objek penelitian ini adalah hakim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana anak berikut putusan-putusan pengadilan anak Pengadilan Negeri Pati.

4. Tehnik Sampling.

Pengambilan *sampling* yang diambil adalah *Non Random Sampling* dengan metode Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini akan dipilih sampel yang dianggap mewakili yaitu para hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal.

6. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang dilakukan di sini berdasarkan atas jenis data yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan jenis data maka penelitian ini didasarkan atas data primair dan sekunder.

a. Data Primair

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Penelitian lapangan ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung

²⁹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik", dalam Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif), UII Press, Yogyakarta, 2007, hal.122.

(interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber/responden dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan para hakim yang menangani perkara anak nakal.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang meliputi :

- 1). Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat baik berupa peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, KUHP, UU No. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak , UU No. 23 tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maupun Per-Undang-Undang-Undang terkait berikut peraturan pelaksanaannya serta putusan-putusan pengadilan anak.
- 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum primer ini dapat berupa karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman *website*, hasil penelitian maupun buku buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Analisa Data.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan cara setiap data yang di peroleh baik dari data primer maupun data sekunder kemudian diseleksi untuk disusun secara teratur agar dapat dianalisis sehingga menghasilkan data deskriptif sedangkan analisa kuantitatif digunakan untuk mengkaji data dalam merumuskan pembaharuan hukum di masa yang akan datang.

Surakhmad Winarno mengemukakan:

“ Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga pelakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Dimana pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif –induktif dan mengikuti tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menunturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti”.³⁰

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistemetaka penulisan merupakan hasil dari penelitian yang akan dituangkan dalam 4 (empat) Bab, dimana tiap Bab terbagi menjadi sub bab-sub bab.

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup dan pembatasan

³⁰ Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, hal. 17.

masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Secara garis besar dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian anak nakal, kenakalan anak, pemidanaan dan tujuan pemidanaan, batas usia pemidanaan anak, jenis-jenis sanksi terhadap anak nakal, persidangan anak dan pemberian sanksi terhadap anak.

Bab III merupakan hasil penelitian serta pembahasannya. Data yang terkumpul merupakan hasil temuan di lapangan akan disusun dan diteliti sehingga memperoleh fakta, yang kemudian dianalisis dan dibahas berdasarkan teori-teori yang relevan. Dalam Bab III ini terbagi atas 3 sub bab yaitu:

1. Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.
2. Problematika yuridis maupun praktis penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.
3. Tindakan hakim mengatasi problema yuridis maupun praktis dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dimasa yang akan datang.

Bab IV adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN ANAK NAKAL

Pengertian anak nakal telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 sebagai berikut :

Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang diancamkan terhadap anak lebih luas daripada perbuatan-perbuatan-perbuatan yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Anak dikatakan sebagai anak nakal apabila melakukan tindak pidana sebagaimana pula diancamkan terhadap orang dewasa selain itu juga terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang bagi anak .

Perbuatan yang dilarang bagi anak dapat berupa apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat artinya pelanggaran terhadap hukum hidup/adat/kebiasaan dalam masyarakat diakui sebagai delik dalam tindak pidana anak.

Maulana Hassan Wadong dalam bukunya “Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak” mengemukakan, bahwa ketentuan kejahatan anak atau delinquency anak diartikan sebagai

bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau peraturan perundang-undangan.³¹

Menurut Sudarto anak nakal adalah:

1. Yang melakukan tindak pidana
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh
3. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/sepengetahuan orang tua/wali/pengasuh.
4. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak itu mengetahui hal itu
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak-anak
6. Yang seringkali menggunakan kata-kata kotor
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak itu.

Meskipun perumusannya tidak jelas namun tentunya yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang memenuhi salah satu kriteria dari ketujuh sebutan itu.³²

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksudkan dengan anak nakal adalah anak yang melakukan suatu perbuatan yang, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan khususnya KUHP, peraturan perundang-undangan diluar KUHP, atau melanggar norma-norma yang dilarang bagi anak maupun norma-norma dalam masyarakat.

³¹ Maulana Hasssan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 21

³² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 135-136

B. KENAKALAN ANAK

Juvenile berasal dari bahasa latin *Juvenile* artinya anak-anak muda. Ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari kata latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Delinquency selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah 22 tahun.³³

Ny. Singgih Gunarso dan Singgih Gunarso dalam bukunya “Psikologi Remaja” menyatakan dilihat dari segi aktifitas kenakalan remaja menunjukkan ciri-ciri pokok dari kenakalan remaja sebagai berikut :

1. Dalam pengertian kenakalan harus dilihat adanya perbuatan atau tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral.
2. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang a-sosial yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada dalam lingkungan hidupnya.

³³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal 7

3. Kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berusia 13-17 tahun dan belum menikah.
4. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seseorang remaja atau dapat dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok remaja.³⁴

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam suatu tulisannya yang berjudul “Kehidupan Remaja dan Masalahnya” membagi dua golongan bagi seseorang dikatakan seorang remaja, ada golongan remaja muda dan golongan remaja lanjut.³⁵ Golongan remaja muda (*early adolescence*) adalah para gadis usia 13-17 tahun sedangkan laki-laki berusia 14-17 tahun. Mereka inilah yang disebut dengan *teenagers*. Apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun, remaja tersebut lazim disebut golongan muda atau pemuda-pemudi (*youth*). Sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati pola sikap dan tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya demikian.

Pengaruh dimana anak bersosialisasi juga dapat menunjukkan perkembangan moral anak karena dalam proses sosialisasi seorang anak tidak hanya belajar beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi juga menginternalisasikan standard moral kultur yang ada dan menerimanya sebagai hal yang benar atau salah yang menjadi cermin nilai-nilai personal mereka. Masalah kondisi moralitas juga sangat berkaitan erat dengan keadaan jiwa seorang anak dalam kehidupannya, karena secara psikologis, di dalam

³⁴ Ny. Singgih Gunarso dan Singgih Gunarso, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1985, hal. 30

³⁵ *Kumpulan Artikel dalam Buku Mengenal dan Memahami Masalah Remaja*, Penyunting Sanusi, Badri dan Syafrudin, Pustaka Antara, Jakarta, 1993 hal. 9

rentang kehidupan anak terjadi apa yang disebut dengan perkembangan moral.³⁶

Dari sisi ilmu jiwa Kenakalan Anak dalam hal ini Ilmu Kesehatan Mental maka kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain yang dianggap sebagai kenakalan atau sebagai perbuatan dosa, oleh ajaran agama dipandang oleh ahli jiwa sebagai manifestasi dari gangguan jiwa atau akibat tekanan batin yang tidak dapat diungkapkan secara wajar. Jadi yang dimaksud dengan kenakalan anak-anak baik yang dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maupun sebagai manifestasi dari rasa tidak puas, kegelisahan, ialah perbuatan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain dan kadang-kadang diri sendiri.³⁷

Memahami kenakalan anak berarti memahami sebab-sebab kenakalan anak. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak menurut Wagianti Soetodjo, "...perlu diketahui motifasinya".³⁸ Bentuk dari motifasi sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksudkan dengan motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri

³⁶ Paulus Hadi Suprpto, Desertasi, yang berjudul *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak* (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), 2003. Op.Cit., hal. 54

³⁷ Ibid, hal. 113

³⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 16.

seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar seseorang.³⁹

Selanjutnya Romli Atmasasmita yang disitir Wagati Soetodjo merumuskan mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:⁴⁰

1. Yang termasuk motivasi instrinsik daripada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegensia.
 - b. Faktor usia.
 - c. Faktor kelamin.
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga.
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah.
 - c. Faktor pergaulan anak.
 - d. Faktor mass media.

Dapat dikatakan bahwa memahami kenakalan anak berarti melihat anak dalam perspektif perbuatannya, mengapa kenakalan anak dapat terjadi, mencari sebab-sebabnya baik dari kejiwaan anak, keluarga, masyarakat dimana anak tumbuh, dan lain sebagainya yang membentuk karakter anak yang menyimpang.

³⁹ Wagati Soetodjo.Op.Cit.hal. 17.

⁴⁰ Loc.Cit.

C. PIDANA dan TUJUAN PEMIDANAAN

1. Pidana.

Istilah “ hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “straf” namun ,... istilah “pidana “ lebih baik daripada “hukuman”. Demikian Sudarto.⁴¹

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan :⁴²

,” Istilah “hukuman” yang merupakan istilah dan konvensional, dapat merupakan arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus. Maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.

Hakikat pidana menurut Hulsman adalah “ *tot de orde roepen*” (menyerukan untuk tertib). Sedangkan Binsbergen berpendirian bahwa ciri hakiki pidana adalah “ *een terechtwijzing door de overheid terzake van een strafbaarfeit*” (suatu pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana).⁴³

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal.2.

⁴² *Loc.Cit.*

⁴³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal.81.

memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁴ Sedangkan Roeslan Saleh merumuskan pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴⁵

Sesuai dengan system hukum yang menganut praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang pengadilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan rumusan secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut:⁴⁶

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang.

2. Tujuan Pidanaan.

Meskipun sebagai reaksi atas suatu delik, pidanaaan bukanlah tanpa tujuan. Tujuan pidanaaan sendiri di dalam KUHP yang berlaku

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi *Op.Cit.* hal 2.

⁴⁵ Roeslan Saleh, dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hal.21.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.* hal.4

sekarang ini tidak dirumuskan secara eksplisit, tujuan pemidanaan hanya ditemukan dalam ilmu hukum.

Pemidanaan tanpa tujuan akan membabi buta, kehilangan arah dan akan mencabik-cabik pemidanaan itu sendiri. Barda Nawawi menyatakan,” Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari system pemidanaan”.⁴⁷

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).⁴⁸ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, “Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara”*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 8.

⁴⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 9.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁴⁹

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :⁵⁰

- a. Teori absolut (retributif).
- b. Teori Teleologis.
- c. Teori retributif-teleologis.

Ad.a Teori absolut .

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.⁵¹ Pidana tidak usah mempunyai tujuan lain selain dari pada pidana saja.

⁴⁹ Herbert L. Packer, Op.Cit., hal 10.

⁵⁰ Muladi, *op.cit.*, hlm. 49-51. Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori pembedaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relative theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*). Lihat Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 27.

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Op., Cit., Hal. 10

Karena kejahatan tidak diperbolehkan, dan tidak diijinkan menurut susila dan hukum, maka tidak boleh terjadi, maka kejahatan itu seharusnya dipidana. Pidana mempunyai fungsi sendiri yaitu bantahan terhadap kejahatan. Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai.⁵² Teori memandang sanksi pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi ditujukan untuk memuaskan adanya tuntutan keadilan.

Ad.b.Teori Teleologis.

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya mencegah orang melakukan kejahatan.

Van Bemmelem membagi dalam dua hal:

1) Prevensi Umum / Pencegahan Umum

⁵² Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung. 1987, hal. 25.

Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya. Pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johannes Andeanaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian “general prevention”, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Jadi dalam teori ini tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), tetapi juga termasuk pengaruh moral atau pengaruh bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social pedagogical influence of punishment*).⁵³

2) Prevensi Khusus /Pencegahan Khusus

Bertolak dari pendapat pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia belajar bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki. Teori tujuan serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.⁵⁴

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998., *Op., Cit.*, hal. 18

⁵⁴ Van Bemmelen, 1987, *Op.Cit.*, hal 27

Dikatakan oleh Van Hamel,⁵⁵ prevensi khusus dari suatu pidana adalah :

- Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
- Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum

Ad.3 Teori retributif-teleologis.

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang

⁵⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hal.

mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbalan/pengimbangan atas suatu tujuan yang titik berat bersifat kasusistis.

Dalam perkembangannya teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut . Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.⁵⁶

Berhubung dengan itu atas kritik berupa tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retributive). Dasar

⁵⁶ Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 61.

penekanan dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.⁵⁷

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan.

Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu: *Pertama*, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku – seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya -- dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.⁵⁸

⁵⁷ Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publising Company, New York, 1987, hlm.352. Dalam Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 003, hlm. 62.

⁵⁸ Micahel Tonry, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, 1996, hlm. 15.

Di samping *just desert model* juga terdapat model lain yaitu *restorative justice model* yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice model*. Van Ness menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik :⁵⁹

- a. *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves; only secondary is it lawbreaking.*
 - b. *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*
 - c. *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*
1. Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu masalah khusus antara hasil perbuatan individu dalam merumuskan korban, kumpulan orang dan pelaku kejahatan; hanya kejahatan terusan yang menyertai terjadinya hukum itu.
 2. Tujuan dari proses peradilan tindak pidana (kejahatan) dapat direkonsiliasikan ketika dilakukan pembaharuan sebab-sebab terjadinya tindak pidana;
 3. Proses peradilan tindak pidana (kejahatan) merupakan partisipasi aktif korban, pelaku dan komunitas. Hal itu tidak dapat didominasi oleh pemerintah kepada enkripsi dari yang lain.

Sedangkan menurut Muladi *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :⁶⁰

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;

⁵⁹ Daniel W. Van Ness, *Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspective*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherlands. hlm. 23.

⁶⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127-129.

- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.⁶¹ Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.⁶²

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai

⁶¹ Muladi, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm.125.

⁶² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta,Bandung, 1996, hlm. 101.

sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.⁶³

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh – korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka -- dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.⁶⁴

D. BATAS USIA PEMIDANAAN ANAK

⁶³ Daniel W. Van Ness, *op.cit.* hlm, 24.

⁶⁴ Allison Morris dan Warren Young, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publishing Ltd, 2000. hlm, 14.

Batas pembedaan bagi anak sangat diperlukan mengingat batas usia akan menunjukkan perlakuan apa yang harus diambil berhubungan dengan perbuatan anak yang bersangkutan dengan hukum.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 secara khusus telah ditentukan batas usia pembedaan anak. Bunyi lengkap Pasal 4 UU No. 3 tahun 1997 sebagai berikut :

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Dari ketentuan di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 3 tahun 1997, diketahui seorang anak dapat diajukan ke dalam sidang anak dalam batas umur antara 8 tahun s/d sebelum 21 tahun, dengan ketentuan perbuatan yang diduga dilakukan anak dalam batas 8 tahun s/d 18 tahun. Sidang anak dapat digelar saat anak berumur 18 tahun s/d sebelum 21 hanya apabila pada saat perbuatan dilakukan anak belum mencapai 18 tahun.

Jika demikian bagaimana dengan anak yang melakukan kejahatan sedangkan umurnya kurang dari 8 tahun. Mengenai hal ini Pasal 5 UU No. 3 tahun 1997 menentukan:

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dari Pasal 5 di atas diketahui, seorang anak yang melakukan tindak pidana sedangkan umurnya kurang dari 8 tahun tidak dapat diperiksa dalam sidang anak. Terhadap anak ini ada 2 alternatif tindakan dalam hal ini tindakan yang dilakukan penyidik yaitu :

Pertama : Diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya jika penyidik berpendapat orang tua, wali atau orang tua asuh masih dapat membina.

Ke dua : Menyerahkan kepada Departemen Sosial jika dipandang orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak dapat membina.

E. JENIS-JENIS SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL.

Jenis-jenis pidana terhadap anak nakal tidak tunduk pada ketentuan pasal 10 KUHP, akan tetapi diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomer 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 32.

Sanksi/jenis-jenis pidana bagi anak nakal dapat berupa pidana maupun tindakan. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana

pokok dan pidana tambahan (Pasal 23 ayat (1)), yang selanjutnya menurut Pasal 23 ayat (2) , pidana pokok yang dapat dijatuhkan ialah :

- a. Pidana penjara.
- b. Pidana kurungan.
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan (Pasal 23 ayat (3)) berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

Selain pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal sebagaimana tersebut di atas, sesuai Pasal 24 (1) Anak Nakal juga dapat dijatuhi tindakan yaitu ;

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau.
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) menambahkan tindakan itu dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim dimana yang dimaksudkan dengan “teguran” adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan dijatuhi tindakan, sedangkan yang dimaksudkan dengan “syarat tambahan” misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. (Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997.

Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 3 tahun 1997 maka terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a) Hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana Pasal 23 atau tindakan sebagaimana pasal 24, akan tetapi khusus anak nakal yang melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 2 huruf b, hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UU No. 3 th. 1997.

Pasal 26, 27, 28,29 dan 30 UU no. 3 tahun 1997 merupakan pedoman pembedaan dimana ancaman maksimal pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (26 ayat (1), sedangkan apabila tindak pidana dilakukan dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.(pasal 26 ayat (2)).

Pasal 26 ayat (3) menentukan Anak Nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 tahun , melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 huruf b.

Selanjutnya dari Pasal 26 ayat (4) diketahui, jika tindak pidana dilakukan Anak Nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 tahun , ancaman pidananya tidak diancam pidana mati

atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24.

Jika anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a diancam dengan pidana kurungan, maka ancaman tersebut $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana kurungan orang dewasa (Pasal 27), $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman orang dewasa ini juga berlaku untuk pidana denda (Pasal 28 ayat (1) , dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan latihan kerja paling lama 90 (Sembilan puluh) hari, dan tiaplatihan tidak lebih dari 4 (empat) jam dan tidak boleh dilakukan pada malam hari (pasal 28 ayat (2) dan (3)).

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) jo ayat (6) Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun dengan jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun. Dijatuhkannya pidana bersyarat oleh pengadilan dengan ditentukan adanya syarat-syarat umum dan khusus. Syarat umum menentukan bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan masa pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus merupakan syarat yang ditentukan dalam putusan hakim untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. (Pasal 29 ayat (2) dan (3). Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat khusus lebih pendek daripad masa pidana bersyarat bagi syarat umum. (Pasal 29 ayat (5)

F. PERSIDANGAN ANAK DAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ANAK.

Proses penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dijatuhkan melalui Pengadilan Anak. Pengadilan Anak adalah persidangan yang dikhususkan untuk anak, sehingga ada beberapa perbedaan dengan asas-asas peradilan untuk orang dewasa. Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.⁶⁵

Sebagai ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981 maupun pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus acara sidang anak dalam UU No. 3 tahun 1997. Darwin Prinst dalam bukunya , Peradilan Anak Indonesia, mengemukakan asas-asas peradilan anak sebagai berikut:⁶⁶

- a. Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 4 ayat (1)).

Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara Pengadilan Anak ditentukan secara limitative, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin.

- b. Kewenangan Pengadilan Anak (Pasal 3).

⁶⁵ Wagianti Soetodjo.Op.Cit. hal 45.

⁶⁶ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal,15-16.

Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak.

c. Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7)).

Terhadap perkara anak nakal harus ditangani pejabat-pejabat khusus, seperti .:

- Di tingkat penyidikan oleh penyidik anak.
- Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak, dan
- Di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak.

d. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat (11)).

Berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengakui peranan dari :

- Pembimbing kemasyarakatan.
- Pekerja sosial.dan
- Pekerja sosial sukarela.

e. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 6 jo.Pasal 42 ayat (1)).

Pemeriksaan perkara anak nakal dilakukan dalam suasana kekeluargaan.Oleh karena itu,dari proses penyidikan hingga persidangan, hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum tidak memakai toga.

f. Keharusan splitsing (Pasal 7).

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer.Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila berstatus militer di peradilan militer.

g. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat (1)).

Acara pemeriksaan di sidang anak pengadilan anak dilakukan secara tertutup.Hal ini adalah demi kepenringan anak sendiri. Akan tetapi agenda pembacaan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

h. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11,14 dan 18).

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

- i. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai dengan 49).

Masa penahan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHAP.

- j. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan 32).

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memungkinkan hakim melakukan tindakan demi kepentingan anak tanpa melalui putusan. Hal ini berkaitan pula dengan tidak adanya kewenangan hakim yang diberikan Undang-Undang yang memuat pemberian diskresi maupun diversi terhadap tindakan anak nakal. Hakim diwajibkan tetap tunduk pada proses acara pidana anak sebagaimana telah diatur melalui Undang-Undang, meskipun pemberian diskresi maupun diversi ini kemungkinan dapat berpengaruh terhadap psikologi anak pelaku tindak pidana yang meliputi psikologi Anak Nakal pada saat melakukan suatu tindak pidana dan psikologi anak setelah dikenakan sanksi pidana.

Putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum, apalagi sekedar memelihara ketertiban,⁶⁷ oleh karena itu putusan hakim berkaitan dengan anak nakal harus berfungsi mendorong perbaikan dalam diri anak dan dapat mewujudkan kesejahteraan anak.

⁶⁷ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007. hal.244

Dalam putusan hakim diwajibkan mencantumkan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi alasan dan dasar putusannya. Kalau tidak, putusannya diancam batal demi hukum. Hakim karena tugas dan jabatannya, memang harus selalu berpikir dan bekerja menurut dan dalam kerangka hukum, tidak boleh di luar hukum. Hakim harus legalistik, tetapi tidak boleh legistik.⁶⁸

Hakim dalam memutus suatu perkara dalam proses pemidanaan diharuskan memperhatikan Pasal 28 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni :⁶⁹

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selain hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hakim diharuskan mempertimbangkan mengenai berat ringannya hukuman, tidak cukup hanya memperhatikan sikap individual terdakwa seperti memberi keterangan berbelit-belit, tidak menunjukkan penyesalan, atau berulang ulang melakukan perbuatan pidana. Hakim wajib mempertimbangkan

⁶⁸ Ibid, hal.240-241.

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2004.

kaitan perbuatan tersebut dengan masyarakat atau negara, nilai-nilai kemanusiaan, bahkan dampak secara regional atau internasional.⁷⁰

Berkaitan dengan putusan anak nakal perlu dikemukakan penjelasan Pasal 25 UU No. 3 tahun 1997 yang menegaskan:

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan anak yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Pengadilan anak diisyaratkan bahwa dalam menjalani proses peradilan anak, anak nakal tidak ditempatkan pada suatu keadaan sebagaimana pelaku tindak pidana yang di kelompokkan sebagai orang dewasa. Selain itu, dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, diperlukan suatu kajian yang melindungi dan memperhatikan anak nakal dari segi sosial budaya. Hak ini tentunya menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana.

Sebagaimana diketahui sosial budaya memiliki peranan penting dalam membentuk karakter anak, sehingga hakim harus memperhatikan dalam pertimbangannya berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana tersebut diatas, hakim harus pula memperhatikan keadaan sosial keluarga anak dan perilaku lingkungan anak.

⁷⁰ Bagir Manan, Op.Cit. hal.245.

Dalam mendapatkan data penunjang terhadap penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, maka hakim mendasarkan pada laporan dari pembimbing kemasyarakatan melalui study kasus atau (*case study*) yang didapatkan dari laporan-laporan kemasyarakatan sosial dan lingkungan anak.

Peranan *case study* yang dibuat petugas sosial sangat penting dalam rangka putusan hakim. *Case Study* ini dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi si anak.⁷¹ Apakah anak akan diberi sanksi berupa pidana atau tindakan, hal ini karena *case study* merupakan gambaran keadaan si anak memuat masalah sosial anak, kepribadian maupun latar belakang anak (masa kecil, pergaulan, hubungan dengan orang tua, maupun latar belakang dilakukannya tindak pidana).

Mengingat anak yang bersinggungan dengan hukum, tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga korban, maka hakim dalam memutus perkara anak nakal harus memahami dengan benar kedudukan anak nakal tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan semata-mata demi untuk kepentingan anak (*the best interest of child*).

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana haruslah diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, oleh karena itu perlu

⁷¹ Wagianti Soetodjo.Op.Cit.hal.47

diperhatikan pendekatan khusus menangani anak nakal yang dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut :⁷²

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) jangan dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op., Cit* (Bandung : Alumni,2007), hal. 123-124.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL.

A. 1. Deskripsi Kasus-Kasus Penjatuhan Sanksi Pada Anak

Perkembangan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari waktu ke waktu semakin bervariasi. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan anak tidak hanya dapat digolongkan sebagai kenakalan semata akan tetapi sudah merupakan tindakan kriminal sehingga mau tidak mau pendekatan pidana terpaksa dilakukan terhadap anak. Tindak pidana di Pengadilan Negeri Pati dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Perkembangan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari waktu ke waktu semakin bervariasi. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan anak tidak hanya dapat digolongkan sebagai kenakalan semata akan tetapi sudah merupakan tindakan kriminal sehingga mau tidak mau pendekatan pidana terpaksa dilakukan terhadap anak. Tindak pidana di Pengadilan Negeri Pati dapat diketahui dari tabel berikut ini:

DATA PERKARA ANAK NAKAL DI PENGADILAN NEGERI

PATI Tahun 2006 - 2008

NO.	UMUR	2006	2007	2008
1.	<10 TAHUN	-	-	-
2.	10-12 TAHUN	1	-	-
3.	12-15 TAHUN	6	5	3
4.	16-19 TAHUN	20	26	23

Sumber : Pengadilan Negeri Pati

Data terlampir

Berdasarkan pada data perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Pati selama tahun 2006 sampai dengan 2008 diatas dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak terjadi kenakalan anak nakal pada anak yang berumur kurang dari 10 tahun. Sedangkan pada pelaku anak yang berumur antara 10-12 tahun terjadi 1 (satu) kasus tindak pidana yakni terjadi pada tahun 2006.

Jumlah perkara anak nakal pada rentang waktu tersebut mengalami penurunan pada anak yang berumur 12-15 tahun. Masing-masing 6 perkara (2006), 5 perkara (2007) dan 3 perkara (2008). Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal yang berumur antara 16-19 tahun sebanyak 20 perkara (2006), 26 perkara (2007) dan 23 perkara (2008).

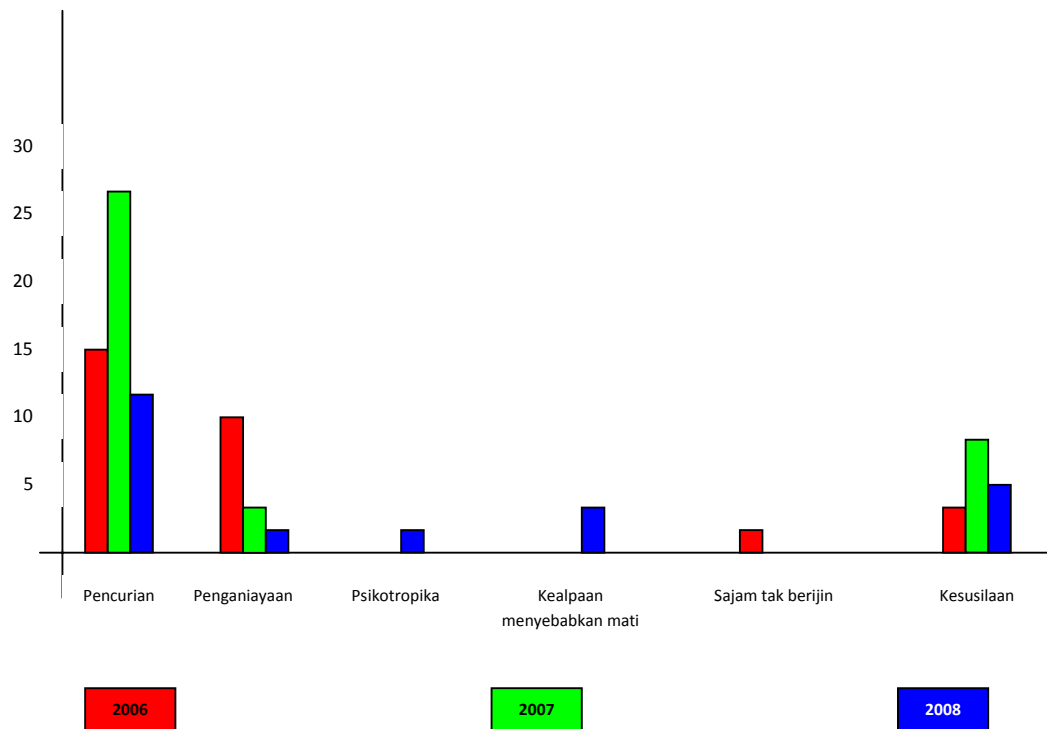
PROSENTASE DATA PERKARA ANAK NAKAL

DI PENGADILAN NEGERI PATI

2006-2008

No	Umur	Jumlah	Prosentase
1	<10 tahun	0	0%
2	10-12 tahun	1	1,19%
3	12-15 tahun	14	16,67%
4	16-19 tahun	69	82,14%
JUMLAH		84	100%

**MATRIK PERBANDINGAN JENIS KASUS PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI PATI
TAHUN 2006 - 2008**



Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Pati dari tahun 2006 sampai dengan 2008 mengindikasikan bahwa bentuk kategori Anak Nakal yang diputus di Pengadilan Negeri Pati mencakup 6 (enam) jenis perkara yakni:

1. Pencurian
2. Penganiayaan
3. Psikotropika
4. Kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang
5. Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;

6. Tindak pidana yang mnyangkut masalah kesusilaan.

Ad.1 Pencurian

Pencurian menempati urutan tertinggi perkara anak nakal baik dalam tahun 2006, 2007 mapun 2008. Dalam tahun 2006 kasus pencurian ada 15 (lima belas) sedangkan pada tahun 2007, tindak pidana pencurian mengalami kenaikan yang tajam dalam jumlah (kuantitas) kasus yang disidangkan. Namun dalam segi kualitasnya mengalami penurunan karena dalam beberapa kasus ternyata terdapat anak yang melakukan kejahatan yang sama (pencurian) lebih dari lima kali (kasus Tr). Pada tahun 2008, tindak pidana pencurian yang dilakukan anak-anak mengalami penurunan yakni 12 (dua belas) kasus yang diputus di Pengadilan Negeri Pati.

Ad. 2 Penganiayaan

Kasus penganiayaan, tahun 2006, terdapat 8. Dalam kasus penganiayaan tahun 2006, ini merupakan yang tertinggi dengan kasus penganiayaan tahun 2007 dan 2008. Dimana kasus penganiayaan pada tahun 2007 putusan pengadilan sebanyak 2 kasus sedangkan pada tahun 2008 hanya terdapat 1 (satu).

Ad.3 Psikotropika

Pada tahun 2006 dan 2007 tidak terdapat kasus psikotropika yang dilakukan oleh anak. Namun pada tahun 2008 terjadi 1 (satu) jenis kejahatan psikotropika. Dalam menyidangkan anak pelaku tindak pidana ini, Pengadilan Negeri Pati mengenakan putusan berupa penjara 5 bulan dan denda Rp. 250.000,00 atau subsider 1 bulan kurungan.

Ad. 4 Kealpaan sehingga menyebabkan matinya seseorang

Demikian juga dengan kasus psikotropika, kasus kealpaan sehingga menyebabkan matinya seseorang juga hanya terjadi di tahun 2008. Kasus kealpaan ini juga terjadi sebanyak 2 (dua) kali

Ad. 5 Kepemilikan Senjata Tajam tak berijin

Dalam kasus kepemilikan terhadap senjata tajam. Pada tahun 2006 terdapat 1 (satu) kasus dengan putusan 2 (dua) bulan 15 hari.

Ad. 6 Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan, pada tahun 2006 terdapat 3 (tiga) kasus yang disidangkan. Sedangkan ditahun 2007 terdapat 8 (delapan) kasus dan di tahun 2008, Pengadilan Negeri Pati menyidangkan 5 kasus.

Berdasarkan pada data kasus anak nakal di Pengadilan Negeri Pati tahun 2006 s/d 2008, menunjukkan adanya beberapa hal yakni:

- 1) Jenis Anak Nakal yang diajukan ke muka Sidang Anak adalah tindak pidana khususnya hampir seluruhnya diatur dalam KUHP.

Jenis perbuatan yang didakwakan dan disidangkan dalam peradilan anak dari tahun 2006 s/d 2008 adalah tindak pidana, hal ini menunjukkan perbuatan yang dilarang untuk anak tidak pernah didakwakan dan disidangkan.

- 2) Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal hampir mencapai 100 % berupa pidana penjara.

Pidana penjara merupakan pilihan hakim dalam menjatuhkan pidana, kalau ada tindakan hal ini karena tindak pidana dilakukan oleh anak yang berumur antara 8 s/d sebelum 12 yaitu ada 1 (satu) kasus dalam tahun 2006.

- 3) Kualifikasi dan jumlah tindak pidana tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Jenis perkara anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pati dapat diketahui pada tahun 2006 dari 27 (dua puluh tujuh) kasus terdiri atas tindak pidana pencurian, penganiayaan, pemilikan senjata tajam dan tidak berijin, dan tindak pidana yang menyangkut masalah kesusilaan. Pada tahun 2007 terdapat 35 kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri meliputi pencurian, penganiayaan dan tindak pidana kesusilaan. Namun ditahun 2008 terjadi kenaikan jumlah jenis kasus yang

disidangkan yakni kasus pencurian, penganiayaan, psikotropika, kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang serta tindak pidana kesusilaan. Walaupun selama tahun 2008 kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pati hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus.

- 4) Pola pemidanaan mayoritas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dapat dilihat bahwa terhadap pola pemidanaan mayoritas seperdua dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini merupakan dasar pertimbangan hakim bahwa anak, walaupun telah melakukan tindakan delinkuen namun dalam hal pemidanaan hakim tetap memperhatikan undang-undang pengadilan anak dan psikologi anak pada saat dijatuhkan putusan maupun setelah dijatuhkan putusan

- 5) Mengenai penahanan terhadap anak nakal yang masih berstatus sebagai pelajar mendapatkan perlakuan yang sedikit berbeda dengan anak yang bukan merupakan seorang pelajar.

Dalam hal penahanan, setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap kasus perkara pidana tersebut ternyata anak nakal yang tidak dilakukan penahanan masih berstatus sebagai seorang pelajar.

- 6) Penjatuhan sanksi terhadap anak yang berumur 16-18 tahun dirasakan lebih lama daripada anak yang berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun.

Berdasar pada data tersebut dapat dilihat bahwa anak yang berumur 16 sampai dengan 18 tahun, sanksi yang dijatuhkan kepada mereka relative lebih berat daripada anak-anak yang berumur 12-16 tahun.

A. 2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Anak.

Putusan merupakan tahap akhir dan merupakan tujuan akhir dari setiap pemeriksaan perkara. Penjatuhan putusan inilah yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa anak nakal. Dalam hal penjatuhan putusan dilakukan hakim tunggal tentulah musyawarah tidak diperlukan akan tetapi dalam hal susunan hakim majelis musyawarah merupakan hal yang wajib.

Menurut pernyataan para hakim di Pengadilan Negeri Pati, putusan merupakan mahkota dari seorang hakim, artinya dari putusannyalah sebenarnya dapat diketahui bagaimana sesungguhnya seorang hakim memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Putusan bukanlah kesimpulan karena putusan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang mendalam atas setiap perkara. Pertimbangan ini diperoleh dari fakta-fakta yang

terungkap di persidangan Suatu putusan yang memuat sanksi didahului oleh pernyataan terbuktinya seorang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu. Berkaitan dengan sanksi pada anak nakal dapat berupa pidana maupun tindakan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 3 Tahun 1997.

Dasar pertimbangan-pertimbangan mendalam yang dilakukan hakim dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dapat dikategorikan dalam beberapa faktor, yaitu : 1. Faktor Yuridis

2. Faktor Non Yuridis.

Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, hakim tidak dapat mendasarkan faktor yuridis saja kalau tidak mau terjebak dalam legalisme semata yang bersifat kaku dan tidak pernah mencapai keadilan. Untuk itu faktor yuridis dan faktor non yuridis dipertimbangkan hakim bersama dalam satu kesatuan .

Ad.1. Faktor Yuridis.

Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian.

Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan anak nakal.

Selanjutnya selain jenis pidana, faktor yuridis berkaitan juga dengan pertanggungjawaban pidana dari anak nakal. Di sini hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh anak nakal dapat dipertanggungjawabkan kepada anak. Adakah unsur kesalahan atas diri anak nakal atas perbuatan yang didakwakan.

Selain itu faktor yuridis ini juga berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, lamanya ancaman pidana dan bentuk dari pidana jenis pidana yang telah dilakukan.

Ad. 2. Faktor Non Yuridis.

Kajian non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada anak nakal di sini terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. Filosofis.

Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi

terhadap anak nakal. Dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan atas tujuan yang telah digariskan undang-undang yang bersangkutan.

Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal maka dasar filosofis penjatuhannya tidak lain adalah demi kepentingan terbaik anak sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 3 Tahun 1997.

2. Sosiologis,

Faktor sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal ini, diperoleh dari laporan kemasyarakatan yang didapat dari BAPAS. Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 56 sehingga laporan kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi.

Faktor sosiologis ini menjadi juga menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan di masa yang akan datang terhadap anak nakal, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan dipertimbangkan matang-matang.

3. Psikologis.

Dalam rangka penjatuhan sanksi faktor psikologis merupakan faktor penting sebagai dasar pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal. Dengan faktor psikologis akan berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Untuk itu pertimbangan psikologis dijadikan pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana karena pemahaman terhadap aspek psikologis ini memungkinkan adanya penggambaran terhadap persepsi hakim terhadap anak nakal tersebut. Dalam rangka penjatuhan sanksi pidana, hakim memperoleh laporan kemasyarakatan dari BAPAS maupun pendapat dari BAPAS dipersidangan serta diketahui dari perilaku anak selama menjalani persidangan anak.

4. Kriminologis.

Faktor kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada faktor kriminologis ini, hakim dalam rangka penjatuhan sanksi mempertimbangkan motif dari anak nakal dalam melakukan tindak pidana yang akan berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan sanksi kepada anak nakal.

Meskipun faktor yuridis dan faktor non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal akan tetapi kenyataannya, pidana perampasan kemerdekaan tetap menjadi posisi sentral dalam *stelsel* sanksi pidana. Kebanyakan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak walaupun anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana. (lihat tabel perkara di atas)

Penjatuhan penjara ini menunjukkan pidana hanya dipandang sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan , bahkan terlihat adanya pandangan pembedaan dipandang sebagai pembalasan. Hal ini dapat diketahui dari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara secara umum dalam hal-hal yang memberatkan setiap perkara anak nakal adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup meresahkan masyarakat

B. PROBLEMATIKA YURIDIS MAUPUN PRAKTIS DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL.

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan pengadilan anak khususnya memiliki peranan yang penting dalam menjaga wibawa hukum. Namun demikian dalam kenyataannya bukan berarti pengadilan anak terlepas dari adanya problematika yuridis maupun praktis yang dialami hakim sebagai poros sentral dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.

Problematika penjatuhan sanksi terhadap anak terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak itu sendiri. UU No. 3 tahun 1997 yang telah mencabut pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang mengatur *straf modus* dan *straf sort* tentang system pemidanaan untuk anak yang bertujuan semata-mata untuk kepentingan anak (*the best interest of child*) sehingga tercapai perlindungan dan menghindari stigmatisasi pada anak dalam menjalani proses pidana ternyata setelah berjalan lebih dari satu dasa warsa dalam prakteknya tidak dapat memenuhi tujuan akhir dari undang-undang tersebut.

Ketidakberhasilan kalau tidak mau disebut sebagai kegagalan ini diakibatkan karena undang-undang ini lebih menonjolkan pendekatan yuridis formal yang menutup upaya diskresi maupun diversi dalam

mencari solusi perkara anak nakal, padahal diskresi maupun diversi inilah yang merupakan roh (meminjam istilah Barda Nawawi) agar tujuan akhir Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tercapai.

Problematika yuridis selanjutnya yang dialami hakim dalam penjatuhan sanksi pidana berkaitan dengan istilah anak nakal yang dipergunakan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan penyebutan anak yang berhadapan dengan hukum di setiap tingkatan pemeriksaan, dalam arti anak yang berhadapan dengan hukum menurut undang-undang ini disebut dengan “Anak Nakal” . Penyebutan ini tentunya sudah merupakan masalah tersendiri karena stigmatisasi sudah dimulai saat pemeriksaan.

Penyebutan Anak Nakal ini jelas sudah melanggar praduga tak bersalah, mengingat yang dimaksudkan dengan Anak Nakal sebagaimana Pasal 1 angka 2 adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penyebutan anak nakal terhadap anak yang masih dalam proses persidangan jelas sangat merugikan anak, karena seharusnya penyebutan

anak nakal baru setelah adanya putusan yang menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum bersalah.

Pemberian label “anak nakal” pada anak yang berhadapan dengan hukum sebelum penjatuhan putusan pada dasarnya bertentangan dengan konvensi hak anak, perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Pemberian label seperti ini akan berdampak buruk pada sistem peradilan anak di Indonesia. Pemberian label sebagai anak nakal dalam pembacaan suatu putusan dan atau selama proses persidangan berarti sudah ada pernyataan (statement) yang dijadikan dasar bahwa anak tersebut sudah merupakan anak nakal dan sepatutnya perlu mendapatkan sanksi atau hukuman.

Secara psikologis anak akan memproteksi diri apabila bersalah sehingga dengan pelabelan anak nakal yang disangkakan pada anak yang belum tentu bersalah akan memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum secara pribadi melindungi diri sendiri dengan memberikan keterangan yang bohong selama proses persidangan. Selain itu dalam suatu proses persidangan akan kesulitan menggali kebenaran . Kondisi seperti ini mengakibatkan tujuan dari pembedaan tidak akan tercapai dan akan memberikan suatu persepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tidak merupakan suatu institusi yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan namun digunakan sebagai sarana untuk menghukum.

Jika dikaji lebih jauh mengenai persepsi anak nakal, dengan adanya pencitraan (*labelling*) anak sebagai suatu bagian anak nakal maka akan tercipta cara pandang dari anak bahwa dia adalah anak nakal dan tidak mungkin lagi orang lain mau mengerti bahwa dia sebenarnya adalah anak baik yang sedang berusaha untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya namun berhadapan dengan hukum.

Apabila anak sudah berpikir demikian dalam memandang dirinya maka dalam suatu peradilan anak, kondisi ini akan berpengaruh pada hakim (anak) dalam penjatuhan sanksi.

Pemberian pandangan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak nakal tentunya menjadi suatu problematika sendiri yang dialami hakim dalam penjatuhan sanksi pidana. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya suatu pencitraan yang menganggap bahwa anak tersebut merupakan anak nakal dan oleh karenanya layak mendapatkan sanksi tanpa menghiraukan adanya pendapat-pendapat lain diluar hasil pemeriksaan anak. Pandangan ini tentulah memberikan suatu dampak yang tidak baik dalam kehidupan anak tersebut karena dapat menjadikan anak terhambat perkembangan jiwanya.

Selain adanya problematika yuridis yang telah memberikan label anak nakal baik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan maupun pada anak pelaku tindak pidana, di sisi lain juga dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak tidak memuat tentang pedoman pemidanaan yang lengkap padahal pedoman pemidanaan ini akan dijadikan dasar hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak. Pidana bersyarat hanya mungkin dijatuhkan terhadap pidana penjara (Pasal 29 huruf a), dan terhadap pidana pokok jenis lain tidak diatur.

Dari data yang telah dikemukakan di muka sebagian besar putusan pengadilan berupa pidana penjara ,hal ini menunjukkan adanya karena lemahnya sistem pidana denda karena tidak adanya pedoman pemidanaan, hakim anak lebih suka menjatuhkan pidana penjara singkat daripada menjatuhkan pidana denda meskipun bentuk ancaman pidana yang didakwakan bersifat alternatif (penjara atau denda).

Hal yang menarik adalah meskipun dijatuhi pidana penjara, upaya banding praktis tidak dilakukan terdakwa, hal ini menunjukkan terdakwa lebih cenderung memilih dipidana penjara yang seringannya daripada harus menghadapi proses yang lebih panjang.

Selanjutnya dalam konteks problematika praktis sebenarnya sudah dimulai dari tata ruang sidang yang dalam hal ini tata ruang sidang antara orang dewasa dan sidang anak pada prinsipnya tidak ada perbedaan.Kalaulah ada perbedaan karena disediakannya tempat/kursi untuk Pembimbing Kemasyarakatan serta tempat/kursi untuk orang tua anak nakal. Denah Ruang Sidang menunjukkan anak nakal dijadikan obyek pemeriksaan,hal ini jelas bertentangan dengan aspek perlindungan

anak karena anak ditempatkan dalam posisi tepat berada di tengah-tengah yang tentunya akan menjadi pusat perhatian.

Denah ruang sidang telah menjadi problem tersendiri bagi hakim karena dengan menempatkan terdakwa sebagai obyek pemeriksaan tentulah dalam menggali secara lengkap kebenaran materiil sebagai bahan pertimbangan dalam putusan menjadi tidak efektif, konsekwensi lebih lanjut sanksi yang dijatuhkanpun tidak akan maksimal dalam rangka untuk kepentingan terbaik anak.

Problematika praktis selanjutnya adalah pengedepanan hukum formal dalam peradilan anak nakal. Pengedepanan hukum formal mengakibatkan prosedural lebih diutamakan padahal diketahui tujuan terbaik pemidanaan anak tidak akan mungkin tercapai apabila hakim semata-mata terlalu formalistis.

Kenyataan bahwa hakim sering menghindari tindakan di persidangan yang ke luar dari aturan hukum formal meskipun hakim anak mengetahui hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka kepentingan terbaik anak menunjukkan hukum formal adalah segalanya.

Pengedepanan prosedural ini mengakibatkan hakim tidak berani membuat terobosan-terobosan hukum dalam praktek peradilan anak, bahkan lebih lagi dapat mengakibatkan hakim merasa bersalah apabila tidak menjalankan hukum formal sebagaimana mestinya.

Persepsi yang demikian menjadikan hukum acara harus dilaksanakan sebagaimana tersurat dalam hukum acara yang ada. Hakim tidak berani ke luar dari hukum acara karena akan dianggap sebagai seorang hakim yang tidak profesional. Ketidakberanian hakim ini justru menyulitkan hakim itu sendiri, di satu sisi demi mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diperlukan terobosan pemeriksaan, di sisi lain hakim anak terbelenggu hukum acara. Lebih lanjut hal ini merupakan suatu bumerang bagi sistem peradilan yang berlaku di Indonesia saat ini karena dalam proses peradilan, pengadilan anak dituntut untuk tidak menggunakan proses beracara yang sama dengan orang dewasa untuk menghindari terjadinya sikap traumatis anak.

Pengedepanan persepsi hukum formil daripada persepsi hukum materiil tentunya dapat berakibat pada adanya stigmatisasi anak sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai anak nakal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sebagaimana telah penulis uraikan jika hakim terlalu formalistis maka akan merugikan anak nakal bahkan sistem peradilan anak itu sendiri tidak dapat berjalan. Namun demikian Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi ternyata juga memandang hukum formal lebih diutamakan pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Putusan MARI No. 920 K/Pid/2008 dan Putusan MARI No. 667/K/Pid/2008, sebagaimana dikemukakan Achmad Setyo Pudjoharsoyo Ketua Pengadilan Negeri Kebumen dalam makalahnya yang disajikan

dalam rangka ,” Rapat Kerja Daerah Jawa Tengah 4 Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 5 s/d 7 Nopember 2009 di Semarang ⁷³ yang menyampaikan adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung RI yang intinya memerintahkan Pengadilan Negeri Kebumen untuk membuka sidang kembali sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

Secara lengkap bunyi amar putusan n MA No. 920 K/Pid/2008 tanggal 15 oktober 2008 yo Putusan PT. Semarang No. 330/Pid/2007/PT.smg tanggal 4 Januari 2008 yo Putusan PN Kebumen No. 232/Pid.B/2007/PN Kbm tertanggal 26 September 2007 adalah :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri kebumen tersebut;
- Membatalkan putusan pengadilan tinggi jawa tengah di Semarang No. 330/Pid/2007/PT.Smg tanggal 29 Febuari 2008

MENGADILI SENDIRI

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kebumen untuk membuka sidang kembali
- Menanggung biaya perkara dalam semua tingkat peradilan sampai ada putusan akhir dalam perkara ini

Serta putusan ke dua , Putusan MA No. 667/K/Pid/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yo Putusan PT. Semarang No. 323/Pid/2007/PT.Smg

⁷³⁷³ Ahmad Setyo Pudjoharsoyo, *Rapat Kerja Daerah Jawa Tengah 4 Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI*: makalah, Semarang, 2009

Tanggal 3 Januari 2008 yo Putusan PN Kebumen No. 237 /Pid.B/PN.Kbm

Tertanggal 26 September 2007 dengan amar:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri kebumen tersebut;
- Membatalkan putusan pengadilan tinggi jawa tengah di Semarang No. 323/Pid/2007/PT.Smg tanggal 3 Januari 2008 yang membatalkan Putusan PN Kebumen No. 237/Pid.B/2007/PN. Kbm tertanggal 26 September 2007

MENGADILI SENDIRI

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kebumen untuk menyidangkan perkara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
- Menanggihkan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan sampai ada putusan akhir dalam perkara ini

Selanjutnya Pengadilan Negeri Kebumen telah mencari dasar pertimbangan putusan MA No. 920/K/Pid/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang memerintahkan Pengadilan Negeri Kebumen, “ *membuka sidang kembali*”. Dan diketahui bahwa Pertimbangan Hakim Kasasi atas perkara tersebut adalah “*Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi / Judex Factie tidak berdasarkan hukum karena Pengadilan Tinggi / Judex Factie telah salah mengadili perkara aquo yaitu peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi / Judex Factie bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 karena para terdakwa masih anak-anak / belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga permohonan kasasi harus dikabulkan dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kebumen untuk membuka sidang kembali.*”

Terhadap putusan MA No. 667/K/Pid/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang memerintahkan , “*untuk menyidangkan perkara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997*”. Dasar pertimbangannya adalah: “*Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut oleh karena para terdakwa berumur 15 sampai 16 tahun dalam UU No 3 Tahun 1997 termasuk dalam anak-anak dan ternyata diperiksa dengan pemeriksaan hukum acara biasa sedangkan seharusnya para terdakwa disidangkan dengan mempergunakan hukum acara sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, oleh karena itu putusan Judex Factie batal demi hukum dan memerintahkan Pengadilan negeri untuk menyidangkan perkara ini sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1997.*”

Pengadilan Negeri Kebumen selanjutnya meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang dimohonkan kasasi baik pertimbangan-pertimbangan putusan maupun membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan namun tidak menemukan adanya asas-asas peradilan anak maupun acara peradilan anak yang dilanggar dari pemeriksaan awal sampai putusan akhir. Dan setelah meneliti kembali dengan seksama Kalimat Pembuka atas perkara- perkara tersebut baik dalam BAP Persidangan maupun Putusan Akhir tidak secara tegas menyebutkan:..”*Peradilan Anak..*” dan hanya kata: “*Peradilan Tingkat Pertama....*” sehingga dapat disimpulkan permasalahan utama, ada pada redaksional Putusan maupun BAP Persidangan yang tidak secara tegas mencantumkan kata-kata “*...Peradilan Anak..*”,

Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan dengan penulisan *Peradilan Tingkat Pertama*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa peradilan tingkat pertama dan tingkat banding telah menerapkan peradilan umum terhadap anak nakal meskipun Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan telah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan telah pula menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak tersebut. Hal ini dapat disimpulkan Mahkamah Agung tidak melihat substansi pemeriksaan tetapi hanya melihat apa yang tersurat saja, sehingga menjadi jelas *prosedur* lebih diutamakan dari *substansi*.

Meskipun perintah putusan Mahkamah Agung ini akan menimbulkan masalah tetapi toh tetap Mahkamah Agung memerintahkan demikian. Masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan perintah menyidangkan kembali adalah :

1. Apakah Hakim Tingkat pertama harus memeriksa kembali perkara anak tersebut dari awal sampai akhir dan kemudian menjatuhkan putusan akhir mengingat perintah dalam putusan kasasi adalah : “*untuk membuka sidang kembali / untuk menyidangkan perkara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997*;
2. Bagaimana, jika terdakwa anak tersebut telah kawin atau berumur lebih dari 21 tahun. Sedangkan diketahui batas toleransi untuk dapat disidangkan dalam sidang anak adalah di bawah 21 tahun dan atau tidak kawin (vide pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997)

3. Apakah dengan menyidangkan kembali anak tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Pengadilan Anak mengingat UU ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum. Anak selaku terdakwa yang kemungkinan telah dapat “*sembuh*” dari trauma sebagai dampak proses peradilan, kemudian dihadapkan kembali pada situasi yang sama. Dalam kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan ia akan mengalami trauma kembali.

Jadi jelas bahwa hukum formil demikian ketatnya sehingga bagi para hakim mau tidak mau harus mengikuti prosedur persidangan sebagaimana ditentukan dalam hukum formil (acara) bahkan demikian sakralnya penyebutan “ Peradilan Anak “ dengan “ Pengadilan Tingkat Pertama “ harus diperintahkan sidang ulang sesuai UU No. 3 tahun 1997. Untuk itu pemahaman prosedur (hukum acara) yang demikian sangat berpengaruh bagi hakim anak baik langsung maupun tidak langsung dalam penjatuhan sanksi. Hakim anak akan selalu ragu apabila ingin ke luar dari hukum formil meskipun manfaat terobosan yang diambil lebih besar bagi anak dan mengetahui hukum formil yang ada akan menimbulkan masalah jika diterapkan , seperti perintah Mahkamah Agung dalam putusan di atas.

Dapat dikemukakan ketidak sinkronnya antar Penegak Hukum terhadap penanganan anak nakal khususnya antara Hakim Anak dan Jaksa Penuntut Umum Anak juga merupakan problematika praktis selanjutnya dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.

Dalam perkara No. 182/Pid.B/2008/PN.Pt, yang terkenal dengan sebutan perkara “Geng Nero” demi kepentingan anak sanksi pidana penjara dijatuhkan selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa anak nakal. Dengan hukuman ini praktis setelah putusan dibacakan terdakwa anak nakal ini mendapatkan pembebasan. Putusan ini berbeda jauh dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan . Dasar pertimbangan hakim memutus 2 (dua) bulan penjara adalah terdakwa anak nakal masih sekolah dan telah ada perdamaian dengan korban maupun keluarga besar korban.

Dari putusan tersebut dapat diketahui hakim anak berpendapat pemenjaraan yang lama dianggap tidak akan efektif bahkan cenderung merugikan dan merusak masa depan anak, hal ini tentulah berbeda dengan pandangan Jaksa Penuntut Umum yang menganggap pidana penjara yang relatif lama dianggap lebih efektif apabila dijatuhkan terhadap anak nakal. Dalam kasus ini akhirnya Jaksa mengajukan banding.

Terlepas banding adalah hak para terdakwa anak nakal dan Jaksa Penuntut Umum Anak, dalam kasus ini (*Geng Nero*) menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antar aparat penegak hukum khususnya antara hakim anak dan Jaksa Penuntut Umum Anak dalam rangka *the best interest of child*.

Selanjutnya Paulus Hadisuprpto menyatakan, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memang sejak awal sudah didisain diperuntukkan untuk menangani anak dalam proses peradilan, dengan kata lain kebijakan kriminal yang dianut dalam menangani anak nakal lebih diutamakan melalui proses persidangan.⁷⁴ Berhubung dengan itu selanjutnya Paulus Hadisuprpto menyatakan ,... mau tidak mau titik sentral penanganan anak nakal bertitik tumpu di tangan hakim anak, hakim anaklah sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1997 yang mempunyai peran besar mengemban amanat penanganan anak nakal berdasarkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*).⁷⁵

Kalau demikian, jika titik sentral penjatuhan sanksi terhadap anak nakal terletak pada hakim, hal ini berarti dalam rangka penjatuhan sanksi pidana terhadap anak nakal, hakim memiliki peranan yang sangat dominan. Hakim dapat menjadi faktor positif akan tetapi sebaliknya hakim dapat menjadi sebuah problem yang sangat potensial tersendiri dalam peradilan anak. Subyektifitas hakim menjadi faktor penting dalam rangka peradilan anak. Untuk itu hal pertama yang harus dimiliki seorang hakim (anak) adalah memiliki pemahaman yang benar dalam menangani setiap perkara anak nakal. Hakim harus selalu berorientasi kepada tujuan sebagaimana ditentukan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁷⁴ Paulus Hadisuprpto, Loc.Cit., hal 10.

⁷⁵ Ibid, hal 15.

Berorientasi kepada tujuan sebagaimana ditentukan dalam UU NO. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak . Artinya tidak hanya memandang anak sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi juga memandang anak sebagai korban (victimogen) atas perbuatan yang dilakukan.

Disparitas terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal dalam banyak hal diakibatkan dari persepsi yang berbeda –beda dalam memandang Ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Pemahaman yang benar dalam penanganan perkara anak nakal dapat dimulai dari memahami mengenai posisi dan penggolongan anak berdasarkan pada klasifikasi umur anak pada saat melakukan suatu tindak pidana.

Pengklasifikasian umur akan sangat berpengaruh terhadap penjatuhan sanksi yang dijatuhkan. Pengklasifikasian umur mempunyai arti yang penting bagi hakim (anak) karena memahami pengklasifikasian umur akan dapat membantu hakim (anak) dalam memahami psikologi anak , dan selanjutnya pemahaman yang benar terhadap klasifikasi umur anak akan membantu hakim memahami fase-fase perkembangan anak . Hal ini akan berakibat berakibat adanya kecenderungan hakim juga akan dapat memahami dan mengerti kondisi anak pada saat melakukan tindak pidana.

Selanjutnya dalam memahami perlindungan anak dan kesejahteraan anak berarti hakim harus memperhatikan :

1) Ruang lingkup perlindungan;

Dalam sistem perlindungan anak, pada dasarnya harus mengetahui mengenai ruang lingkup perlindungan anak diantaranya adalah:

- a) Perlindungan pokok yang harus dipenuhi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- b) Perlindungan yang meliputi jasmaniah dan rohaniah.
- c) Perlindungan yang berhubungan dengan penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2) Jaminan pelaksanaan perlindungan.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap anak, maka dalam rangka perwujudan perlindungan anak maka ditempuh hal-hal sebagai berikut:

- a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan;
- b) Adanya suatu jaminan yang dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan

daerah yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat;

- c) Pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut untuk ditiru.

Berdasarkan beberapa hal yang patut diperhatikan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan anak diatas maka perlindungan dan kesejahteraan anak dirumuskan sebagai berikut:

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat;

Dalam hal perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, persepsi hakim dalam rangka penjatuhan pidana erat hubungannya dengan konsepsi pemberian rasa adil. Pemberian rasa adil yang meliputi adanya keadaan yang mengakibatkan suatu rasa ketenteraman baik bagi para pelaku anak maupun para korban.

Untuk itu dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, hakim harus tetap dan lebih memperhatikan anak tidak hanya sebagai pelaku namun juga sebagai korban dari suatu tindak pidana. Hal inilah yang perlu dikaji lebih mendalam mengenai posisi dan keadaan yang dijadikan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana.

Pemahaman hakim yang demikian ini didasarkan pada aturan mengenai dasar perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai mana telah dijelaskan secara eksplisit dalam konvensi hak-hak anak. Adapun dasar perlindungan anak adalah:

a) Dasar filosofis;

Dasar pertimbangan terhadap perlindungan anak didasarkan pada aspek filosofis. Hal ini berpengaruh terhadap adanya suatu upaya pemenuhan filosofis Pancasila dalam kegiatan yang menjadi dasar-dasar dalam suatu kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

Berkaitan dengan perlindungan anak terhadap penjatuhan sanksi terhadap anak nakal hendaknya berkaitan dengan keadaan psikologis anak dalam penjatuhan sanksi pidana yang meliputi keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana dan keadaan psikologis anak setelah dipidana.

Selain pemahaman terhadap psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana maka hakim juga harus memahami anak nakal dari suatu perspektif psikologi anak setelah dipidana. Persepsi hakim dalam memahami psikologis anak setelah anak tersebut dijatuhi pidana sangat perlu untuk diperhatikan. Perhatian ini berhubungan dengan dampak atau

akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah anak tersebut dipidana. Pemidanaan anak bukan hanya untuk tujuan memidana anak, namun juga dijadikan sebagai suatu sarana untuk menyadarkan anak agar tidak melakukan suatu tindak pidana yang sama atau tindakan lain setelah menjalani pidana.

Perkembangan jiwa anak setelah menjalani pidana menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan pidana, bila tidak demikian halnya maka dikhawatirkan perkembangan jiwa anak tidak semakin baik melainkan semakin buruk. Dalam menjatuhkan pidana pidana, hakim harus mempertimbangkan kondisi anak setelah dipidana.

b) Dasar etis;

Dasar perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Untuk itu berkaitan dengan peradilan anak dan perlindungan anak, hakim harus memposisikan sebagai seseorang yang tidak hanya berfungsi untuk memutus perkara pidana saja namun juga sebagai faktor penentu mengenai perkembangan anak di masa yang akan datang.

c) Dasar yuridis.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, hal yang menjadi faktor perhatian hakim adalah mengenai suatu peraturan perundang-undangan yang mengkaji mengenai anak seperti Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Persepsi ini merupakan suatu kajian dasar yuridis mengenai adanya hukum acara pidana dan hukum pidana sebagai mana diatur dalam suatu sistem peradilan anak. Dalam konteks ini hakim harus menggunakan asas ketentuan khusus mengalahkan ketentuan yang bersifat umum.

2. Adanya usaha untuk melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;

Persepsi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana harus menekankan sebagai suatu upaya untuk melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan secara positif. Hal ini

berarti dalam hal penjatuhan sanksi terhadap anak nakal memiliki keterkaitan yang erat dalam hal pemenuhan hak asasi anak.

3. Adanya pemahaman terhadap permasalahan manusia yang merupakan suatu bagian dari kenyataan sosial;

Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap perkara pidana maka, peranan hakim dituntut untuk lebih aktif dalam rangka pemahaman kondisi anak sebagai suatu bagian dari kenyataan sosial dan tindakan yang dilakukan juga merupakan bagian dari suatu dampak sosial.

4. Adanya pemenuhan terhadap suatu tindakan hukum yang dapat memiliki akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan pada hukum.

Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, peranan tindakan hukum dan peranannya harus benar-benar diperhatikan. Hal ini menjadi suatu pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bahwasannya, dalam hal perbuatan pidana anak tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya dalam suatu persidangan selayaknya pelaku tindak pidana orang dewasa namun terhadap pelaku tindak pidana anak ini harus diselesaikan berdasarkan pada ketentuan dalam undang-undang pengadilan anak.

Pemenuhan unsur hukum ini hendaknya menjadi suatu perhatian yang mengakibatkan adanya suatu pemisahan yang jelas terhadap

pelaksanaan proses hukum peradilan untuk tidak mencampur adukkan perkara terhadap anak nakal dan orang dewasa.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap anak nakal pada dasarnya juga diperhatikan faktor-faktor lain seperti:

- Hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
- Hal-hal lain yang harus memiliki landasan filsafat, etika dan hukum;
- Adanya pandangan yang bersifat rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Adanya suatu asas kemanfaatan yang kelak dipergunakan oleh anak nakal misalnya adanya pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dapat menunjang kehidupan anak setelah keluar dari permasalahan hukum;
- Adanya suatu pemahaman terhadap kepentingan yang diatur bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
- Tindakan yang dijatuhkan oleh hakim harus bersifat konsisten tidak bersifat aksidental dan komplimenter;
- Pemahaman terhadap penjatuhan sanksi yang tidak hanya berdasarkan pada faktor kriminogen namun juga berdasarkan faktor viktimogen.

- Pemahaman bahwa dasar penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap anak nakal haruslah bersifat restoratif (pemulihan) bukan sebagai sarana untuk pertanggungjawaban pidana.

Selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut, dalam rangka penjatuhan sanksi maka terdapat hal-hal yang menjadikan pemahaman hakim dalam rangka penjatuhan sanksi pidana yakni:

- Pandangan anak untuk tidak dapat berjuang sendiri;
- Adanya pendapat kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of child*)
- Adanya rancangan daur kehidupan terhadap kehidupan anak (*life-circle approach*).
- Adanya pemahaman terhadap lintas sektoral anak.

C. TINDAKAN HAKIM DALAM MENGATASI PROBLEM YURIDIS DAN PRAKTIS PENJATUHAN SANKSI PADA ANAK DIMASA YANG AKAN DATANG

Adanya problematika yuridis maupun praktis sebagaimana diuraikan di atas tentulah ke depan harus ada suatu kajian yang memungkinkan hakim melakukan tindakan yang dapat mengatasi problem tersebut. Kajian ini meliputi baik substansi, struktur maupun budaya hukum sebagai berikut :

1. Substansi Hukum.

Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, hakim haruslah memiliki pedoman yang mengatur secara terperinci mengenai aspek-aspek hukum yang berpedoman dalam penjatuhan sanksi pidana itu sendiri. Untuk itu dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, diperlukan adanya pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai sistem peradilan anak telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini telah memuat tujuan yang jelas yaitu dalam rangka memberikan kepentingan terbaik anak (The best interest of child) namun substansi yang diatur dalam undang-undang ini tidak mendukung pencapaian tujuan tersebut bahkan dalam hal tertentu justru bertentangan. Dapat dikemukakan dengan dicabutnya Pasal 45, 46 dan 47 KUHP justru dirasakan mengakibatkan pidana terhadap anak nakal dalam hal-hal tertentu terasa lebih berat karena pasal-pasal ini merupakan pedoman pemidanaan dalam KUHP yang terkait dengan ketentuan Pasal 10 s/d Pasal 43 KUHP. Ditambah lagi adanya ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, mengakibatkan pidana bersyarat hanya dimungkinkan terhadap pidana penjara. Ketentuan ini telah mendorong hakim menjatuhkan pidana penjara dibandingkan bentuk sanksi yang lain (denda).

Pedoman pemidanaan yang tidak diatur dengan jelas, mengakibatkan hakim cenderung tidak mau ke luar dari ketentuan yang ada (norma tertulis) meskipun sebenarnya hakim tersebut mengetahui adanya nilai yang terkandung dalam setiap ketentuan. Sebai contoh mengenai ketentuan minimal penjatuhan pidana. Sesuai tujuan Pengadilan Anak seharusnya ketentuan pemidanaan terhadap anak lebih ringan dari orang dewasa. Benar ancaman maksimal pidana bagi anak telah dibedakan dengan orang dewasa (Pasal 26, 27,28,29 dan 30 UU No. 3 Tahun 1997), akan tetapi ketentuan minimal penjatuhan pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan, dengan demikian berlaku sama dengan yang berlaku bagi oraang biasa, misalnya terhadap Pidana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2003, dengan ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Pasal 81 ayat (1)).Logikanya seharusnya untuk ancaman minimal juga harus dibedakan. Hal ini mengakibatkan Hakim tidak mau menjatuhkan sanksi di bawah ketentuan yang sudah ada, yang berarti dalam kasus sejenis pidana yang dijatuhkan dapat terjadi sama, bila Hakim menjatuhkan pidana minimal.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, anak hendaklah ditempatkan pada suatu persepsi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, akan tetapi di sisi lain Undang-Undang yang berlaku hanya memandang anak sebagai pelaku dengan menempatkan anak

nakal sebagai obyek pemeriksaan. Untuk itulah perlu diatur mengenai suatu konsepsi yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban tindak pidana.

Selanjutnya pencapaian tujuan dalam undang-undang ini tidak tercapai kalau tidak dapat dikatakan gagal karena dalam rangka kepentingan terbaik anak diperlukan adanya diskresi maupun diversi. Akan tetapi ketentuan ini tidak mengatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan diskresi maupun diversi. Sebagai akibat tidak adanya diskresi maupun diversi maka proses peradilan anak di Pengadilan selalu bermuara pada putusan, dan dapat diketahui putusan berarti berkaitan dengan salah benar yang sanksinya berupa pidana maupun tindakan.

Pemberian diskresi maupun diversi ini akan memungkinkan hakim dapat melakukan tindakan secepatnya yang didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum memiliki suatu kepentingan yang harus dilindungi demi kepentingan anak (*the best interest of child*).

Pemakaian istilah Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997, juga merupakan masalah tersendiri. Istilah ini telah menstigmatisasi anak mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Seharusnya istilah ini harus diganti misalnya dengan *Anak yang Berhadapan dengan Hukum* atau istilah lainnya.

Selanjutnya dalam rangka pembaharuan substansi agar hakim dapat melakukan tindakan terbaik dalam hal mengatasi problematika yuridis maupun praktis terhadap anak nakal di masa datang diperlukan penerapan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan suatu pembaharuan yang memandang anak nakal dari sudut pandang penyembuhan luka yang diderita korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat.

Dengan penerapan *restorative justice* akan timbul pergeseran arah pemidanaan dari tujuan pemidanaan yang bersifat menghukum dan atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan berganti menjadi suatu perbuatan yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan dan merupakan suatu tindakan yang bersifat menyejahterakan antara pelaku, korban dan masyarakat.

Prinsip dasar peradilan restoratif bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, baik dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak karena orientasinya adalah korban, pelaku dan masyarakat.

Dengan memperhatikan terhadap ciri serta karakteristik model peradilan restoratif maka dapat dikatakan bahwa peradilan restoratif tidak saja berdimensi tunggal namun juga berdimensi jamak yakni mencakup tentang korban, pelaku dan masyarakat.

Perlu pula dikemukakan untuk masa datang diperlukan pembaharuan ketentuan acara sidang anak . Ketentuan mengenai pemeriksaan persidangan anak di pengadilan sekarang ini telah menempatkan anak sebagai obyek pemeriksaan, yang harus langsung dikonfrontir dengan para saksi dipersidangan sehingga posisi anak langsung berhadap-hadapan sama seperti peradilan pada orang dewasa. Kondisi ini tentulah sangat memprihatinkan, anak harus diposisikan sebagai subyek yang terlibat dalam proses peradilan.

Akhirnya mengingat terbatasnya jenis dan pengaturan sanksi anak dalam UU No. 3 Tahun 1997, telah menimbulkan kecenderungan penjatuhan pidana penjara kepada anak nakal. Melihat begitu besarnya kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu dimasukkan rumusan alternatif- alternatif dari pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan sebagaimana disebutkan dalam The Beijing Rules pada Rule 18 mengenai macam-macam tindakan yang dapat dijatuhkan pada terpidana anak yaitu;

1. Pidana pengawasan
2. Pengawasan (Probation),

3. Kerja sosial (Community Service order),
4. Pidana denda atau ganti rugi (Compensation, restitution),
5. Perawatan lanjutan dan perintah perawatan lainnya (intermediate treatment and other treatment orders),
6. Perpartisipasi dalam kegiatan kelompok konseling dan kegiatan lain serupa (orders to participate in group counselling and similar activities),
7. Membantu perkembangan dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang mendidik (orders concerning foster care, living communication or other educational setting),
8. Tindakan-tindakan lain yang relevan (other relevant orders).

Rumusan dalam “The Beijing Rules” mengindikasikan bahwa perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak, dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, kerugian pada diri anak dapat dicegah.

Dalam asas umum SMRJJ ini menegaskan akan peranan peradilan anak yang tidak lain merupakan bagian dari keadilan sosial. Untuk itu mencapai peradilan anak yang berorientasi semata-mata kepentingan terbaik anak hendaknya perlu dilakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang telah diuraikan di atas.

2. Struktur Hukum.

Struktur berkaitan dengan personel para penegak hukum dalam hal ini hakim. Adanya problematika yuridis maupun praktis semakin membuktikan betapa posisi hakim sebagai titik sentral dalam peradilan anak. Untuk itu hakim anak harus benar-benar memahami masalah anak dan mempunyai persepsi yang benar persepsi yang benar terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan mendasarkan pada kenyataan ini, untuk dimasa yang akan datang mulai perekrutan hakim anak harus lebih selektif dan tidak didasarkan atas usulan dan kreteria subyektif semata dari Ketua Pengadilan Negeri. Hakim anak yang mengenal anak dan dengan pendekatan yang berbeda dalam mengadili dan memutus perkara anak. Hakim anak benar diusulkan dari para hakim namun harus tetap ada proses seleksi agar dapat dilantik sebagai hakim anak.

Sinkronisasi antar penegak hukum juga sangat diperlukan dalam rangka pemberian sanksi terhadap anak nakal. Hakim anak dan jaksa harus mempunyai pemahaman yang sama terhadap kepentingan terbaik anak sehingga bentuk tuntutan maupun putusan tidak begitu jauh berbeda seperti dalam kasus *Geng Nero* Jaksa Penuntut Umum menuntut 2 tahun 6 bulan (dua tahun enam bulan) sedangkan hakim anak memutus 2 (dua) bulan.

Pembaharuan struktural di masa yang akan datang juga memerlukan suatu ketentuan yang memungkinkan hakim tidak terbelenggu oleh aturan formal semata. Untuk itu diharapkan dalam penyelesaian perkara pidana anak diatur tersendiri sehingga hakim dalam penyelesaian perkara pidana tidak berbenturan dengan hukum formil yang ada dalam sistem peradilan anak.

3. Kultur atau Budaya Hukum.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana pada anak nakal, ternyata terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan sanksi pidana. Hal ini mengandung maksud bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana, walaupun substansi dan pemenuhan unsur sama dengan orang dewasa namun pengenaan sanksi pidananya tidak sama dengan orang dewasa.

Kultur bangsa Indonesia adalah saling memaafkan dan selalu berusaha kembali pada keadaan keseimbangan apabila ada goncangan terhadap hal-hal yang mengganggu adanya keseimbangan. Tanpa terkecuali atas adanya suatu perbuatan pidana maupun perbuatan yang dilarang untuk anak yang telah dilakukan anak nakal.

Budaya ini harus dikembangkan dalam berhukum, untuk itu tindakan hakim mengatasi problem yuridis maupun praktis dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap nakal harus juga mencerminkan budaya ini. Hakim harus mendorong agar baik korban, terdakwa

maupun masyarakat menyelesaikan kasus anak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia ini.

Budaya saling memaafkan dan selalu kembali kepada keseimbangan akan mengurangi bahkan menghilangkan stigmasi terhadap anak. Lebih lanjut anak nakal akan dipandang sebagai bagian yang merupakan pribadi dalam masyarakat yang perlu mendapat pengayoman.

Jika demikian peran hakim di sini diharapkan sebagai jembatan/mediator dalam suatu persidangan anak. Hal ini dimaksudkan agar antara korban, pelaku dan masyarakat sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan.

Kultur kebersamaan antar para penegak hukum, memiliki suatu persepsi yang sama dalam memandang anak sebagai suatu pelaku sekaligus korban juga perlu dikembangkan. Hal ini diharapkan akan menciptakan persepsi yang sama bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya anak nakal namun dapat pula anak tersebut merupakan korban dari lingkungan yang perlu untuk dilindungi demi kepentingan bangsa dan negara.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian dalam pembahasan diatas maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi yang ada dalam suatu peradilan pidana anak mengindikasikan bahwa mengenai putusan yang dijatuhkan tetap mempertimbangkan kondisi anak. Hal ini dilihat dari adanya suatu upaya pemahaman hakim dalam penjatuhan sanksi dengan mempertimbangkan keadaan anak dalam penjatuhan

sanksi. Maksud dari pernyataan ini adalah hakim melihat anak nakal tidak hanya dipandang sebagai pelaku akan tetapi juga sebagai korban.

Faktor-faktor penjatuhan sanksi terhadap anak nakal merupakan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Adapun faktor-faktor penjatuhan sanksi terhadap anak nakal adalah faktor yuridis dan faktor non yuridis. Baik faktor yuridis maupun non yuridis didasarkan atas fakta-fakta dipersidangan yang merupakan saling keterkaitan antara keterangan saksi, terdakwa, laporan kemasyarakatan dari BAPAS, maupun pendapat dari petugas BAPAS serta orang tua terdakwa anak nakal.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, hakim anak tidak dapat mendasarkan salah satu faktor misalnya hanya berdasarkan faktor yuridis. Pendasaran hanya pada faktor yuridis dan mengabaikan faktor non yuridis mengakibatkan putusan tidak mencapai tujuan keadilan dan hanya bersifat legistik.

Faktor Yuridis merupakan fakta-fakta hukum yang berkaitan pertanggungjawaban pidana, jenis tindak pidana dan berat ringannya pidana maupun ancaman pidana. Sedangkan faktor non yuridis meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan kriminologis. Faktor non yuridis ini digunakan oleh hakim dalam rangka memandang pelaku secara objektif dan realistik. Hal ini mengandung maksud bahwa dalam

hal penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan anak (*the best interest of child*).

2. Problematika yuridis maupun praktis dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat problematika yuridis maupun problematika praktis. Adapun problem yuridis dalam proses peradilan anak meliputi:

- Pemberian label anak nakal dalam Undang-Undang Pengadilan Anak

Pemberian label anak nakal kepada anak yang berhadapan dengan hukum akan memberikan suatu stigmatisasi buruk terhadap anak. Hal ini dikarenakan beban psikologis selama proses persidangan yang selalu menyebut anak nakal dapat membawa akibat gangguan psikologi anak baik selama proses persidangan maupun setelah menjalani putusan.

- Kurangnya jenis maupun aturan pemidanaan pemidanaan

Kurangnya jenis pemidanaan turut mendukung problematika yuridis terhadap penjatuhan pidana. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang menyangkut mengenai penjatuhan sanksi pidana dalam rangka pemenuhan tujuan pemidanaan. Problematika yuridis yang menyangkut mengenai jenis pemidanaan sudah barang tentu menjadi suatu hal yang semakin membuat putusan hakim menjadi

lebih dilematik dalam hal penjatuhan pidana karena terbatasnya pilihan sanksi yang dianggap sesuai dengan anak nakal.

Ancaman pidana maksimal telah dibedakan, akan tetapi ancaman pidana minimal tidak diatur, hal ini mengakibatkan tertutupnya hakim menjatuhkan pidana sesuai tujuan terbaik, dimana tidak ada pilihan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal ancaman yang telah ditentukan.

- Dicabutnya Pasal 45, 46 dan 47 KUHP menyebabkan jenis pemidanaan terhadap anak menjadi semakin berat.

Dengan dicabutnya Pasal 45, 46 dan 47 KUHP justru dirasakan mengakibatkan pidana terhadap anak nakal terasa lebih berat karena pasal-pasal ini merupakan pedoman pemidanaan dalam KUHP yang terkait dengan ketentuan Pasal 10 s/d Pasal 43 KUHP. Ditambah lagi adanya ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, mengakibatkan pidana bersyarat hanya dimungkinkan terhadap pidana penjara. Ketentuan ini telah mendorong hakim menjatuhkan pidana penjara dibandingkan bentuk sanksi yang lain.

Selain problematika yuridis, ternyata dalam proses peradilan pidana anak ini juga terdapat problematika praktis. Adapun problematika praktis yang dihadapi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana antara lain:

- Sistem pemeriksaan pada peradilan anak.

Pemeriksaan anak nakal di sidang anak yang tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara orang dewasa telah menempatkan anak sebagai obyek pemeriksaan karena anak diletakkan di tengah yang menjadi pusat perhatian. Pemeriksaan anak yang ada mau tidak mau telah menempatkan anak nakal berhadapan langsung dengan para saksi. Anak dikonfrontir langsung dengan para saksi, padahal saksi kebanyakan yang lebih dominan terdiri dari orang dewasa. Hal ini tentunya mengakibatkan anak nakal akan berada dalam tekanan tersendiri sehingga tidak mendapat perlindungan dari sistem pemeriksaan yang ada.

- Adanya suatu keterikatan hakim lebih mengutamakan hukum formil/prosedur dalam peradilan anak.

Dalam rangka penjatuhan sanksi dalam suatu proses peradilan pidana, hakim mengalami masalah yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan sidang. Dalam pelaksanaan sidang, prosedur persidangan menjadi suatu hal yang harus dilakukan dan tidak dapat dikesampingkan meskipun hal tersebut sebagai upaya melakukan tindakan terbaik untuk anak nakal. Hal ini mengandung arti bahwa dalam hal penjatuhan sanksi, hakim dapat melakukan suatu kesalahan namun akan tidak dapat dimaafkan jika hakim meninggalkan prosedur persidangan.

- Kurangnya pemahaman hakim terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Dalam hal pemahaman hakim terhadap anak turut menjadi suatu problem praktis. Hal ini dikarenakan jika hakim anak tidak memahami kondisi anak dalam perspektif perlindungan anak dan kesejahteraan anak serta pengadilan anak maka hakim akan terjebak penerapan yang sama sistem peradilan pidana anak seperti peradilan pidana untuk orang dewasa.

3. Tindakan hakim dalam mengatasi problem yuridis dan praktis penjatuhan sanksi pada anak di masa yang akan datang.

Dalam mengatasi problematika yuridis maupun praktis terhadap penjatuhan sanksi pada masa yang akan datang, maka perlu adanya perhatian baik mengenai Substansi, kultur maupun budaya hukum sebagai berikut :

- Substansi hukum

Dalam mengkaji mengenai tindakan hakim dalam mengatasi problema yuridis maupun praktis penjatuhan sanksi di masa yang akan datang maka berkaitan dengan substansi hukum yang menjadi perhatian adalah :

- a) Substansi Undang Undang tentang Pengadilan Anak diformulasikan dengan memandang anak nakal tidak hanya sebagai pelaku akan tetapi juga sebagai korban.
- b) Adanya diversi dan diskresi
- c) Memandang bahwa peradilan anak digunakan sebagai sarana pemulihan antara pelaku, korban dan masyarakat. Sehingga hal ini akan menekankan bahwa peradilan restoratif digunakan sebagai sarana peradilan bagi anak.
- d) Pelaksanaan ketentuan SMRJJ dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal.

- Struktur hukum

Sinkronisasi antara penegak hukum terutama antara hakim dan jaksa merupakan suatu hal yang penting sehingga hakim dan jaksa memiliki pandangan yang sama mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak nakal. Dalam rangka penjatuhan sanksi pidana, hakim dan jaksa diperlukan kesamaan pemikiran bahwa dalam menjatuhkan sanksi pada anak nakal bukan sebagai upaya menghukum tetapi digunakan sebagai sarana pemulihan (restorative) antara pelaku, korban dan masyarakat.

- Kultur budaya hukum

Indonesia yang kental dengan budaya saling memaafkan, menghargai dan menghormati dapat dijadikan sebagai suatu sarana hakim dalam mengatasi problematika yuridis maupun praktis. Hal ini diupayakan agar terbina suatu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam kaitan dengan penanganan perkara anak nakal.

B. SARAN

Dalam menunjang pembaharuan sistem peradilan anak diharapkan dapat tercipta suatu tindakan untuk menjawab problem yuridis maupun praktis. Adapun untuk menjawab problem yuridis hendaknya dilakukan dengan memperbaiki undang-undang pengadilan anak dengan lebih memfokuskan pada hal-hal yang menyangkut:

1. penjatuhan sanksi/pemidanaan;
2. pemberian diskresi kepada hakim sebagai poros sentral dalam sistem peradilan anak;
3. pengaturan mengenai adanya diskresi maupun diversifikasi ;
4. pembaharuan mengenai sistem dalam proses pemeriksaan dalam peradilan anak.

Sedangkan dalam hal menjawab problema praktis diharapkan akan tercipta suatu keadaan yang menggambarkan mengenai tindakan-tindakan praktis yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak yang meliputi:

1. adanya seleksi hakim anak. Hal ini dikarenakan hakim sebagai poros sentral dari sistem peradilan pidana anak dituntut untuk memahami anak dari sudut pandang pengadilan anak, perlindungan anak dan kesejahteraan anak.
2. adanya suatu tindakan yang melibatkan anak dalam proses pemeriksaan. Hal ini perlu dilakukan agar anak tidak hanya dipandang sebagai suatu objek tetapi subyek dalam pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, R, *Hukum Perlindungan Anak: Cetakan Kedua*, PTIK, Jakarta, 1983
- Ainswort, Peter B and Ken Pease, *Police Work*, The British Psychological Society and Methuen, New York, 1987
- Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
- Arief, Barda Nawawie, *Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Sudut Hukum Pidana*, Makalah Seminar Nasional Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh FH. UNDIP, tanggal 25 Januari 1993
- , *Mediasi Penal: "Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan"*, Pustaka Magister, Semarang, 2008
- , *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, BP-UNDIP Semarang, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992
- , *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Bachtiar, Harsja, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 1994
- Barker, Thomas dan David L. Carter, *"Police Deviance" Penyimpangan Polisi (Penyadur Kunarto)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999
- Brotodiredjo, Soebroto, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit tentang Hukum Kepolisian di Indonesia Menyingsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru*: Bunga Rampai, PTIK, Jakarta, 2004
- Creswell, John W, *Research Design: Cetakan Kedua*, KIK Press, Jakarta, 2002
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Djamin, Awaloedin, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Sanyata Sumasana Wira Sespim POLRI*, CV. Mandiri Buana, Bandung, 1995
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Gunarso, Singgih, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1985
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan*, UNDIP, Semarang, 1996
- , *PeradilanRestoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Kumpulan Pidato Guru Besar Fakultas Hukum Uniersitas Diponegoro, BP. UNDIP, Semarang, 2006
- , *Desertasi: Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, 2003
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997
- Hakrisnowo, Hakristuti, “Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Anak”; Makalah Semiloka Sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Jakarta, 1989
- Horton, Paul, B and Chester L. Hunt, *Sosiologi: Alih Bahasa Aminudin Ram*, Erlangga, Jakarta, 1992
- Irsan, Koespramono, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, PTIK Press, Jakarta, 2004
- , *Anak: Dalam Seminar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran*, Jakarta, 2006
- Ismail, Chaerudin, *Polisi: Pengayom dan Penindas*, Citra Indonesia, Jakarta, 1998
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Radja Grafindo Persada, 2005
- , *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 2002

- Kelana, Momo, *Memahami Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002: latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002
- , *Membangun Budaya Polisi Indonesia: Mencari Strategi Format dan Paradigma Baru POLRI Masa Depan*, Jakarta, 2002
- , *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 1994
- Kunarto, *Kapita Selekta Binteman (Pembinaan Tenaga Manusia) POLRI*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1999
- , *Better Police Etics: A Practical Guide, Pedoman Praktis Memperbaiki Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1999
- , *Memperbaiki Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999,
- , *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta manunggal, Jakarta, 1996
- Kusuma, Mulyana W, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1988
- Loqman, Loebby, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Lubis, Mochtar, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII, Yogyakarta, 2007
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Napitupulu, R.M, *Kumpulan Beberapa Peraturan Perundang-undang Berkaitan Dengan Tugas-Tugas Kepolisian*, Edisi Ketiga, Jakarta, 1998
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Catatan Kriminalitas*, Jayabaya Universty Press, Jakarta, 2001
- , *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban Jakaarta, 2001
- Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas*, Citra Jakarta, Jakarta, 1998

- Poernomo, Bambang, *Perkembangan Hukum Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Program Ilmu Hukum, Magister Manajemen, PSUII, Yogyakarta, 1998
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Prasetyo, Eko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1969
- Pujiriyanto, Vitri dan Muhammad Rusmawardi, *Pengantar Hukum Pidana*, Bahan Kuliah FH. UNTAMA, 2008
- , *Kriminologi*, Bahan Kuliah FH. UNTAMA, 2008
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- , *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002
- , *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Reksodipuro, Maardjono, *Polisi Dan Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Alat Penegak Hukum: dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, YPKIK, Jakarta, 2004
- , *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Sadli, Sapparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977
- Siagian Sondang, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Ethiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1997

- Simorangkir, JCT dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Soehuddin, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983
- , *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987
- , *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill Co. Jakarta, 1990
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Suparlan, Parsudi, "Masyarakat: Struktur Sosial" Dalam Buku Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat, Editor A.W. Widjadja, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
- , *Paradigma Naturalistik Dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya* Jurnal Antrophologi Indonesia, Vol. XXI, No. 53 September
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, program Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia, jakarta, 2000
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Supramono, Gatot, *hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Transito, Bandung, 1994
- Stoner, James AF dan R. Edward Freeman, *Manajemen*, Intermedia, Jakarta, 1994

Tabah, Anton, *Patroli Polisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

-----, *Membangun Polisi yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhakusuma, Jakarta, 2001

Tanudjaja, R. Memet, *Sejarah Kepolisian di Indonesia*, Mabes Polisi, Jakarta, 1999

Van Ness, Daniel W, *Restorative and International H.R Restorative Justice International Perspective*, The Netherland

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Masalah metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keanekaragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Penelitian Metodologi Penelitian, FH. UNDIP, 1993

Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000

DOKUMEN

Republik Indonesia, Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

-----, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

-----, Peran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP

-----, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

-----, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

-----, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

<http://www.antara.co.id/arc/2008/6/17/anak-geng-nero-butuh-pemulihan-mental/>

http://news.indosiar.com/news_read.htm.id

<http://pustaka.bahasa,diknas.go.id/kbbi>

LAMPIRAN:

DATA PERKARA ANAK NAKAL DI PENGADILAN

NEGERI PATI Tahun 2006 - 2008

2006						
No	No. Register	Identitas/Umur	Dakwaan	Lama Penahanan	Tuntutan Jaksa	Putusan Pengadilan
1	30/Pid.B/2006	Am, 15 tahun	Pasal 368 ayat 1 KUHP <i>jo</i> Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP	11-01-2006 s.d 13-03-2006	4 bulan	2 bulan 25 hari
2	33/Pid.B/2006	Sk, 15 tahun pelajar	Pasal 351 ayat 1 KUHP	14-01-2006 s.d 06-03-2006	7 bulan	3 bulan 15 hari
3	65/Pid.B/2006	Maf, 19 tahun	Pasal 362 KUHP	04-02-2006 s.d	8 bulan	4 bulan 15 hari

				01-05-2006		
4	105/Pid.B/2006	Sg, 14 tahun pelajar	Pasal 362 KUHP	27-04-2006 s.d 28-06-2006	6 bulan	3 bulan 15 hari
5	110/Pid.B/2006	Ar, 18 tahun	Pasal 351 KUHP	30-03-2006 s.d 19-06-2006	4 bulan	3 bulan
6	118/Pid.B/2006	Yp, 17 tahun	Pasal 363 ayat 1 KUHP	13-05-2006 s.d 27-07-2006	10 bulan	2 bulan 15 hari
7	186/Pid.B/2006	Jk, 14 tahun pelajar	Pasal 368 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP	24-08-2006 s.d 11-10-2006	5 bulan	2 bulan 15 hari
8	196/Pid.B/2006	Pg, 17 tahun	Pasal 351 KUHP	21-09-2006 s.d 17-10-2006	3 bulan	2 bulan
9	196/Pid.B/2006	Sd, 17 tahun	Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP	17-06-2006 s.d 18-10-2006	5 bulan	4 bulan
10	217/Pid.B/2006	Ep, 16 tahun pelajar	Pasal 2 ayat (1) UU 12/DRT/1951 atau Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP	09-09-2006 s.d 16-11-2006	7 bulan	3 bulan 15 hari
11	218/Pid.B/2006	CA, 16 tahun pelajar	Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP	16-09-2006 s.d 16-11-2006	2 bulan	2 bulan
12	222/Pid.B/2006	Tb, 16 tahun	Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP	16-09-2006 s.d 08-11-2006	7 bulan	3 bulan, 15 hari
13	225/Pid.B/2006	Wh, 17 tahun	Pasal 363 ayat 1 ke-4	22-09-2006 s.d	5 bulan	2 bulan

			KUHP	22-11-2006		
14	236/Pid.B/2006	Nm, 10 tahun pelajar	Pasal 65 ayat 1 KUHP <i>jo</i> Pasal 82 ayat 1 UU No.23/2002 Pasal 287 ayat 1 KUHP lebih subsider Pasal 290 ayat 2 KUHP Lebih subsider lagi Pasal 53 ayat (1) KUHP <i>jo</i> Pasal 290 ayat (2) KUHP	28-11-2006 s.d 29-03-2006	Menyerahkan kepanti sosial	Dikembalikan ke orang tua
15	238/Pid.B/2006	Tg, 17 tahun dan Dd, 16 tahun	Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP	03-10-2006 s.d 03-12-2006	3 bulan	2 bulan
16	240/Pid.B/2006	As, 14 tahun	Pasal 81 ayat 1 UU No. 23/2002 atau Pasal 285 KUHP Subsider Pasal 287 ayat 1 KUHP Lebih subsider Pasal 290 ayat 2 KUHP	07-11-2006 s.d 13-12-2006	3 tahun 6 bulan	1 tahun 9 bulan
17	243/Pid.B/2006	So, 19 tahun	Pasal 351 ayat 1 KUHP	10-09-2006 s.d 11-01-2007	9 bulan	7 bulan
18	244/Pid.B/2006	And, 19 tahun	Pasal 406 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 KUHP	11-09-2006 s.d 12-12-2006	10 bulan	8 bulan
19	248/Pid.B/2006	Ns, 14 tahun	Pasal 363	12-10-	7 bulan	2 bulan

		pelajar	ayat 1 ke-5 KUHP	2006 s.d 18-12-2006		
20	252/Pid.B/2006	Mz, 17 tahun dan Mr, 16 tahun, pelajar	Pasal 363 KUHP	14-10-2006 s.d 13-12-2006	4 bulan	2 bulan
21	260/Pid.B/2006	Dn, 17 tahun	Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP	15-10-2006 s.d 13-12-2006	1 tahun 4 bulan	1 tahun
22	262/Pid.B/2006	Ms, 18 tahun da, Mn, 18 tahun	Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP	16-09-2006 s.d 10-01-2007	1 tahun	7 bulan
23	273/Pid.B/2006	DB, 19 tahun	Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP	03-10-2006 s.d 09-01-2007	6 bulan	3 bulan
24	277/Pid.B/2006	Md, 55 tahun dan Sh, 18 tahun	Pasal 284 ayat 1 ke 2a KUHP dan Pasal 284 ayat 1 ke 1b KUHP	27-12-2006 s.d 07-02-2007	5 bulan	3 bulan 15 hari
25	280/Pid.B/2006	Smr, 17 tahun, pelajar	Pasal 170 ayat 1 ke-2 KUHP Subsider Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP <i>jo</i> Pasal 351 ayat 1 KUHP	23-11-2006 s.d 23-01-2007	3 bulan	2 bulan
26	282/Pid.B/2006	Ar, 19 tahun	Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP Subsider Pasal 351 ayat 2 ke 1 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 80 ayat 2 UU No. 23/2002	02-01-2007 s.d 20-02-2007	8 bulan	4 bulan
27	283/Pid.B/2006	Wh, 17 tahun	Pasal 363	21-12-	5 bulan	2 bulan 15

			ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP	2006 s.d 22-01- 2007		hari
--	--	--	---------------------------------	----------------------------	--	------

3. Sumber: Data Pengadilan Negeri Pati

2007						
No	No. Register	Identitas/Umur	Kualifikasi Dakwaan	Lama Penahanan	Tuntutan Jaksa	Putusan Pengadilan
1	1/Pid.B/2007	Mj, 18 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	10-01-2007 s.d 06-02-2007	1 tahun	6 bulan
2	14/Pid.B/2007	Am, 16 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	21-12-2007 s.d 14-02-2007	5 bulan	3bulan
3	23/Pid.B/2007	Ad, 19 tahun dan Sd, 28 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP	14-11-2006 s.d 19-02-2007	6 bulan	4 bulan
4	30/Pid.B/2007	Af, 17 tahun, Ek, 12 tahun. Ar, 12 tahun, pelajar	Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dan Pasal 5 KUHP <i>jo</i> Pasal 53 ayat (1)KUHP	03-01-2007 s.d 21-02-2007	4 bulan	2 bulan 15 hari
5	33/Pid.B/2007	Sgt, 16 tahun, pelajar	Pasal 170 ayat 1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1)KUHP	07-01-2007 s.d 06-03-2007	4 bulan	2 bulan 15 hari
6	63/Pid.B/2007	MY, 17 tahun dan SA, 17 tahun, pelajar	Pasal 170 ayat 1 KUHP	07-02-2007 s.d 12-04-2007	5 bulan	2 bulan 15 hari
7	67/Pid.B/2007	Ud, 19 tahun	Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002	11-01-2007 s.d 14-06-2007	5 tahun penjara, denda Rp. 60.000.000,00 atau subs. 4 bln kurungan n	3 tahun penjara, denda Rp. 60.000.000,00 atau subs. 2 bulan kurungan
8	70/Pid.B/2007	Am, 16 tahun	Pasal 363 ayat (2)	21-03-2007 s.d	9 bulan	4 bulan 15 hari

				01-05-2007		
9	71/Pid.B/2007	Es, 17 tahun Dn 17 tahun	Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP subsider	22-02-2007 s.d 30-04-2007	1 tahun	1 tahun 10 bulan
10	83/Pid.B/2007	Zm, 18 tahun Mn, 24 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	25-01-2007 s.d 03-05-2007	7 bulan	4 bulan
11	86/Pid.B/2007	An, 17 tahun,	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	28-02-2007 s.d 18-04-2007	7 bulan	5 bulan
12	118/Pid.B/2007	Rw, 19 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP	16-03-2007 s.d 07-06-2007	5 bulan	3 bulan
13	133/Pid.B/2007	Tb, 16 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP	13-05-2007 s.d 10-07-2007	6 bulan	4 bulan
14	134/Pid.B/2007	Ep, 17 tahun Bd, 17 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP	13-05-2007 s.d 10-07-2007	6 bulan	3 bulan 15 hari
15	138/Pid.B/2007	Sl, 19 tahun	Pasal 362 KUHP	17-04-2007 s.d 09-07-2007	5 bulan	3 bulan
16	140/Pid.B/2007	Ad, 19 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP _{jo} Pasal 53 ayat 1 KUHP	24-05-2007 s.d 09-07-2007	3 bulan	1 bulan 15 hari
17	169/Pid.B/2007	Kn, 18 tahun	Pasal 2 ayat (1) UU No.12/DRT/1 951	02-06-2007 s.d 15-08-2007	4 bulan	3 bulan
18	188/Pid.B/2007	Js, 14 tahun, pelajar		23-07-2007 s.d 26-09-2007	6 bulan	4 bulan
19	189/Pid.B/2007	Nk, 22 tahun Bn, 18 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-	14-06-2007 s.d	5 bulan (T2)	4 bulan (T2) 8 bulan (T1)

			4,5 KUHP	01-10-2007	8 bulan (T1)	
20	194/Pid.B/2007	Ak, 16 tahun Id, 16 tahun My, 15 tahun Mr, 16 tahun, pelajar	Pasal 170 ayat (1) KUHP	06-09-2007 s.d 27-09-2007	5 bulan 10 bulan percobaan	3 bulan 7 bulan percobaan
21	197/Pid.B/2007	Np, 15 tahun MS, 15 tahun, pelajar	Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP	30-07-2007 s.d 19-09-2007	3 bulan	2 bulan
22	204/Pid.B/2007	Tb, 16 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP	10-09-2007 s.d 25-10-2007	6 bulan	3 bulan
23	209/Pid.B/2007	Tb, 16 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke4,5KUHP	27-09-2007 s.d 08-10-2007	6 bulan	3 bulan
24	213/Pid.B/2007	Tb, 16 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP	27-09-2007 s.d 25-10-2007	6 bulan	3 bulan
25	241/Pid.B/2007	Ep, 17 tahun, pelajar	Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP	10-09-2007 s.d 13-11-2007	3 bulan	2 bulan 15 hari
26	245/Pid.B/2007	Tb, 16 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP	14-11-2007 s.d 21-11-2007	4 bulan	2 bulan
27	246/Pid.B/2007	Tb, 16 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP	14-11-2007 s.d 05-12-2007	4 bulan	2 bulan
28	247/Pid.B/2007	Np, 15 tahun, pelajar	Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP	13-11-2007 s.d 27-11-2007	4 bulan	2 bulan 15 hari
29	248/Pid.B/2007	Tb, 16 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP	12-11-2007 s.d 31-01-2008	4 bulan	2 bulan
30	250/Pid.B/2007	As, 18 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-	20-11-2007 s.d	8 bulan	5 bulan

			4,5 KUHP	13-12-2007		
31	256/Pid.B/2007	Tn, 19 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	02-09-2007 s.d 19-12-2007	10 bulan	1 tahun
32	275/Pid.B/2007	Tg, 17 tahun	Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002	23-10-2007 s.d 09-11-2007	5 tahun penjara, denda Rp. 60.000.000,00 atau subsider 2 bulan kurungan	3 tahun penjara, denda Rp. 60.000.000,00 atau subsider 1 bulan kurungan
33	293/Pid.B/2007	Mb, 18tahun	Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	23-10-2007 s.d 06-02-2008	5 bulan	3 bulan 15 hari
34	294/Pid.B/2007	Ed, 18 tahun Al, 20 tahun	Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	22-10-2007 s.d 06-02-2008	5 bulan	3 bulan
35	303/Pid.B/2007	As, 19 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP	06-10-2007 s.d 24-01-2007	7 bulan	4 bulan

4. Sumber: Data Pengadilan Negeri Pati

2008						
No	No. Register	Identitas/Umur	Kualifikasi Dakwaan	Lama Penahanan	Tuntutan Jaksa	Putusan Pengadilan
1	3/Pid.B/2008	Ep, 17 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP	24-11-2007 s.d 22-01-2008	7 bulan	3 bulan 15 hari
2	27/Pid.B/2008	Ey, 17 tahun,	Pasal 170	06-02-	2 bulan	2 bulan

		pelajar	ayat (2) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat 1 KUHP <i>jo</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	2008 s.d 02-04- 2008	penjara 6 bulan percobaan	penjara 3 bulan percobaan
3	36/Pid.B/2008	Th, 17 tahun	Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP	17-02- 2008 s.d 07-04- 2008	6 bulan penjara 1 tahun percobaan	6 bulan penjara 8 bulan percobaan
4	47/Pid.B/2008	Ag, 17 tahun As, 16 tahun, pelajar	Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat 1 KUHP <i>jo</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	03-03- 2008 s.d 19-03- 2008	3 bulan	2 bulan
5	62/Pid.B/2008	Is, 18 tahun St, 17 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	27-03- 2008 s.d 24-04- 2008	6 bulan	3 bulan 15 hari
6	63/Pid.B/2008	Ml, 16 tahun, pelajar	Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP	15-02- 2008 s.d 03-04- 2008	6 bulan	2 bulan 15 hari
7	76/Pid.B/2008	Mh, 13 tahun, pelajar	Pasal 363 ayat (2) KUHP <i>jo</i> Pasal 53 ayat 1 KUHP	14-04- 2008 s.d 05-05- 2008	3 bulan penjara 6 bulan percobaan	1 bulan penjara 15 hari 3 bulan percobaan
8	112/Pid.B/2008	Zh, 17 tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	15-04- 2008 s.d 09-06- 2008	5 bulan	3 bulan
9	122/Pid.B/2008	Rd, 18 tahun Ar, 18 tahun	Pasal 368 ayat (1) KUHP <i>jo</i> Pasal 55	23-03- 2008 s.d 12-06- 2008	5 bulan	3 bulan

			ke-1 KUHP			
10	125/Pid.B/2008	Ds, 17 tahun	Pasal 362 KUHP	17-04-2008 s.d 25-06-2008	6 bulan	2 bulan 10 hari
11	169/Pid.B/2008	Jm, 17 tahun	Pasal 362 KUHP	21-04-2008 s.d 07-08-2008	7 bulan	5 bulan
12	182/Pid.B/2008	My, Rt, Rn, Yn @ 16 tahun, pelajar	Pasal 170 ayat (1) subsider Pasal 80 ayat (1) UU No. 23/2002	13-06-2008 s.d 10-10-2008	2 tahun 6 bulan	2 bulan
13	220/Pid.B/2008	Nf, 16 tahun, pelajar	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau Pasal 368 ayat (2) KUHP	01-08-2008 s.d 13-10-2008	5 bulan	2 bulan 20 hari
14	236/Pid.B/2008	Mi, 17 tahun, pelajar	Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP	14-08-2008 s.d 21-10-2008	6 bulan	3 bulan
15	265/Pid.B/2008	Sw, 17 tahun	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP <i>jo</i> Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 368 ayat (2) KUHP	01-08-2008 s.d 18-11-2008	6 bulan	4 bulan
16	281/Pid.B/2008	Nr, 18 tahun,	Pasal 351 ayat (1) KUHP <i>jo</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	21-09-2008 s.d 03-12-2008	4 bulan	2 bulan 20 hari
17	284/Pid.B/2008	Ms, 17 tahun	Pasal 363 ayat 1 ke-4	30-09-2008 s.d	6 bulan	3 bulan

			KUHP	10-12-2008		
18	294/Pid.B/2008	Hr, 17 tahun	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP <i>jo</i> Pasal 56 ayat (2) KUHP subsider Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP	04-09-2008 s.d 17-12-2008	1 tahun	6 bulan
19	306/Pid.B/2008	Id, 14 tahun, pelajar	Pasal 359 KUHP	14-12-2008 s.d 12-03-2009	1 tahun	8 bulan
20	315/Pid.B/2008	Aw, 18 tahun	Pasal 81 UU No. 23/2002 <i>jo</i> Pasal 56 (1) KUHP subsider Pasal 81 ayat (2) UU No. 23/2002 <i>jo</i> Pasal 56 ayat (1) KUHP	26-10-2008 s.d 07-01-2009	6 tahun penjara denda Rp.60.000.000,00 subsider 6 bulan	3 tahun penjara denda Rp.60.000.000,00 subsider 2 bulan
21	325/Pid.B/2008	Ap, 17 tahun Dw, 15 tahun, pelajar	Ps 60 ay. (2) <i>jo</i> Ps 71 ay. (1) UU No.5/1997 subs. Ps 62 KUHP <i>jo</i> Ps 71 ay. (1) UU No.5/1997	15-11-2008 s.d 19-01-2009	10 bulan penjara, denda Rp.500.000,00 subsider 1 bulan	5 bulan penjara, denda Rp. 250.000,00 subsider 1 bulan
22	327/Pid.B/2008	Dp, 16 tahun Dn, 17 tahun Lt, 17 tahun, pelajar	Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 80 ayat (1) UU No.23/2002	05-01-2009 s.d 13-03-2009	1 tahun	3 bulan penjara, 8 bulan percobaan

5. Sumber: Data Pengadilan Negeri Pati

